



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENERIMAAN DAERAH
DI KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar: Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

AKMAL HANAFI LUBIS

1415210034

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah di Kabupaten Langkat. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor manakah (pertanian, pariwisata, tingkat hunian hotel, pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus) berpengaruh terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Langkat. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang relevan tersebut berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Langkat.

Dalam penelitian ini menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* dan Regresi Linier Berganda. dimana dalam mengelola data hasil penelitian menggunakan SPSS 16.0. Untuk variabel penelitian ini meliputi variabel terikat dan variabel bebas. Untuk variabel bebas yaitu pertanian, pariwisata dan tingkat hunian hotel, pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sedangkan variabel terikat adalah penerimaan daerah. Untuk metode pengumpulan data yaitu menggunakan data sekunder. Dalam pengumpulan data menggunakan kurun waktu tahun 2007-2017 yang di kumpulkan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian *Confirmatory Factor Analysis* bahwa total *variance explained* diketahui hanya ada 2 komponen variabel yang menjadi faktor mempengaruhi penerimaan daerah. Dari tabel *variance Explained* terlihat bahwa hanya ada 2 faktor yang terbentuk. Karena kedua faktor memiliki nilai total angka *eigenvalues* diatas 1 yaitu sebesar 4,667 untuk faktor 1, kemudian faktor 2 sebesar 1,36. Sehingga proses *factoring* berhenti pada 2 faktor saja yang akan ikut dalam analisis selanjutnya.

Hasil penelitian Regresi Linier berganda menunjukkan bahwa: (1) Variabel dana alokasi umum berpengaruh secara parsial sebesar 0,000. (2) Variabel pariwisata tidak berpengaruh secara parsial sebesar 0,254. (3) Variabel dana alokasi umum dan pariwisata berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan daerah sebesar 0.000.

Kata kunci : Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi umum, Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Tingkat Hunian Hotel, Pariwisata, Pertanian, Penerimaan Daerah.

ABSTRACT

This study is entitled the analysis of the factors that influence regional revenue in Langkat Regency. The purpose of this study is (1) To find and analyze out which factors (agriculture, tourism, hotel occupancy rates, local taxes, regional levies, general allocation funds and special allocation funds) influence regional revenue in Langkat Regency. (2) To find and analyze the relevant variables that have a significant effect on regional income in Langkat Regency.

In this study using Confirmatory Factor Analysis and Multiple Linear Regression. where in managing research data using SPSS 16.0. For this research variables include the dependent variable and the independent variable. For independent variables, namely agriculture, tourism and hotel occupancy rates, local taxes, regional levies, general allocation funds and special allocation funds. While the dependent variable is regional income. For data collection methods, namely using secondary data. In data collection using the period 2007-2017 collected at the Central Statistics Agency of Langkat Regency and the Central Statistics Agency of North Sumatra Province.

The result of the Confirmatory Factor Analysis research is that the total variance explained is known that there are only 2 component variables that are factors affecting regional revenue. From the Explained variance table it can be seen that there are only 2 factors formed. Because both factors have a total value of eigenvalues above 1 that is equal to 4.667 for factor 1, then factor 2 is 1.36. So that the factoring process stops at just 2 factors that will participate in further analysis.

The results of the multiple linear regression research show that: (1) The variable of general allocation funds has a partial effect of 0,000. (2) The tourism variable has no partial effect of 0.254. (3) The variable of general allocation fund and tourism simultaneously influences regional income of 0,000.

Keywords: *Special Allocation Funds, General Allocation Funds, Regional Levies, Regional Taxes, Hotel Occupancy Rates, Tourism, Agriculture, Regional Revenues.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
MOTO PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	15
1. Identifikasi Masalah	15
2. Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian.....	16
2. Manfaat Penelitian.....	16
E. Keaslian Penelitian.....	17
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori	18
1. Penerimaan Daerah	18
2. Potensi Penerimaan Daerah	20
3. Sumber Penerimaan Daerah.....	23
4. Pertanian	26
5. Sektor Pertanian menurut PDRB	27
6. Pariwisata.....	30
7. Jenis-Jenis Pariwisata.....	31
8. Pengembangan Pariwisata	33
9. Tingkat Hunian Kamar Hotel.....	36
10. Pajak Daerah	39
11. Retribusi Daerah	41
12. Dana Alokasi Umum.....	42
13. Perhitungan Dana Alokasi Umum	43
14. Dana Alokasi Khusus.....	44
15. Faktor Yang Mempengaruhi Dana Alokasi Khusus	44
B. Penelitian Sebelumnya	45

C. Kerangka Konseptual	48
D. Hipotesis	50
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	51
C. Definisi Operasional	52
1. Operasional Variabel	52
2. Pengukuran Variabel	53
a. Variabel Bebas atau <i>Independent Variable</i> (X)	53
b. Variabel Terikat atau <i>Dependent Variable</i> (Y)	54
D. Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Analisis Data	55
1. Analisis <i>Confirmatory Factor Analysis</i> (CFA).....	55
2. Uji Asumsi Klasik	56
a. Uji Normalitas	56
b. Uji Multikolinieritas	57
c. Uji Heterokedastisitas.....	57
3. Analisis Regresi Linier Berganda	58
4. Uji Kesesuaian	58
a. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)	58
b. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)	59
c. Koefisien Determinasi (R^2)	60
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	61
1. Gambaran Umum Kabupaten Langkat.....	61
2. Keadaan Penduduk	61
3. Sektor Pertanian.....	68
4. Konsep PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)	69
a. Konsep Pendekatan Produksi.....	70
b. Konsep Pendekatan Pendapatan	70
c. Konsep Pendekatan Pengeluaran	70
5. PDRB Menurut Lapangan Usaha	71
6. PDRB Menurut Pengeluaran	72
7. Pariwisata	73
8. Tingkat Hunian Hotel	75
9. Pajak Daerah.....	77
10. Retribusi Daerah.....	79
11. Dana Alokasi Umum.....	80
12. Dana Alokasi Khusus	82
13. Penerimaan Daerah	83
14. Hasil Analisis <i>Confirmatory Factor Analysis</i> (CFA).....	85
15. Uji Asumsi Klasik	90
a. Uji Normalitas.....	90
b. Uji Multikolinieritas	93
c. Uji Heterokedastisitas	94

d. Uji Autokorelasi.....	95
16. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	95
17. <i>Test Goodnest of fit</i>	97
a. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)	97
b. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji-F)	98
c. Koefisien Determinasi (R^2).....	99
B. Pembahasan.....	100
1. Hasil Analisis <i>Confirmatory Factor Analysis</i> (CFA)	100
2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	101
a. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Penerimaan Daerah	102
1. Hasil Penelitian.....	102
2. Penelitian Sebelumnya	102
3. Kesimpulan Peneliti	102
b. Pengaruh Pariwisata Terhadap Penerimaan Daerah.....	102
1. Hasil Penelitian	102
2. Penelitian Sebelumnya.....	103
3. Kesimpulan Peneliti	103
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penerimaan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	3
Tabel 1.2 Pertanian Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	5
Tabel 1.3 Pariwisata Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	7
Tabel 1.4 Tingkat Hunian Hotel Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	8
Tabel 1.5 Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	10
Tabel 1.6 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	11
Tabel 1.7 Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	13
Tabel 2.1 Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	22
Tabel 2.2 Produksi Pertanian Karet dan Kelapa Sawit Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	29
Tabel 2.3 Objek Wisata di Kabupaten Langkat Menurut Nama Objek Wisata Kecamatan dan Potensi Wisata	32
Tabel 2.4 Pengeluaran Wistawan Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	35
Tabel 2.5 Jumlah Kamar, Jumlah Tempat Tidur dan Tingkat Hunian Hotel Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017	38
Tabel 2.6 Realisasi Penerimaan Rutin Dari Pajak Daerah Otonom Kabupaten Langkat Tahun 2017.....	40
Tabel 2.7 Penelitian Sebelumnya	45
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian	51
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	52
Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga, Penduduk Menurut Kecamatan	62
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk (Jiwa) berdasarkan Jenis Kelamin	63
Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk dan Rata-Rata Penduduk/Desa berdasarkan Kecamatan	64
Tabel 4.4 Komposisi Pendduduk (Jiwa) menurut Umur dan Jenis Kelamin ...	65
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Penduduk (%) Tahun 2015	66
Tabel 4.6 Luas Kecamatan menurut Penggunaanya (Ha).....	67
Tabel 4.7 Sektor Pertanian Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	68
Tebel 4.8 PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2017.....	71
Tabel 4.9 PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2017.....	73
Tabel 4.10 Pariwisata Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	74
Tabel 4.11 Tingkat Hunian Hotel Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	76
Tabel 4.12 Pajak Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	78
Tabel 4.13 Retribusi Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	79
Tabel 4.14 Dana Alokasi Umum Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	81
Tabel 4.15 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	82
Tabel 4.16 Penerimaan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017	83
Tabel 4.17 KMO and Bartlett's Test.	85
Tabel 4.18 Communalities	86

Tabel 4.19 Total Variance Explained.....	86
Tabel 4.20 Component Matrix ^a	88
Tabel 4.21 Rotated Component Matrix ^a	89
Tabel 4.22 Component Transformation Matrix.....	89
Tabel 4.23 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	92
Tabel 4.24 Hasil Uji Multikolinearitas.....	93
Tabel 4.25 Hasil Uji Autokorelasiasi.....	95
Tabel 4.26 Hasil Analisis Regresi.....	96
Tabel 4.27 Hasil Uji_t Statistik.....	97
Tabel 4.28 Hasil Uji F_Statistik.....	98
Tabel 4.29 Koefesien Determinasi.....	99

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Penerimaan Daerah (%) Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.	3
Gambar 1.2 Pertanian (%) Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	5
Gambar 1.3 Pariwisata (%) Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	7
Gambar 1.4 Tingkat Hunian Hotel (%) Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	9
Gambar 1.5 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Miliar) Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	11
Gambar 1.6 Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Miliar) Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017.....	13
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual <i>Confirmatory Factor Analysis</i> (CFA)	49
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Setelah Uji CFA (Regresi Linier Berganda)	50
Gambar 4.1 Grafik Pertanian Kabupaten Langkat (%) Tahun 2007 -2017.....	68
Gambar 4.2 Pariwisata Kabupaten Langkat (Orang) Tahun 2007-2017.....	74
Gambar 4.3 Tingkat Hunian Hotel Kabupaten Langkat (%) Tahun 2007-2017	76
Gambar 4.4 Pajak Daerah Kabupaten Langkat (Miliar) Tahun 2007-2017.....	78
Gambar 4.5 Retribusi Daerah Kabupaten Langkat (Miliar) Tahun 2007-2017	79
Gambar 4.6 Dana Alokasi Umum Kabupaten Langkat (Miliar) Tahun 2007-2017	81
Gambar 4.7 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Langkat (Miliar) Tahun 2007-2017	82
Gambar 4.8 Penerimaan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017	84
Gambar 4.9 Scree Plot.....	87
Gambar 4.10 Hasil Uji Normalitas dengan Histogram	91
Gambar 4.11 Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot	92
Gambar 4.12 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot	94

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Pertanian, Pariwisata, Tingkat Hunian Hotel, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Penerimaan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017
- Lampiran 2 KMO and Bartlett's Test
- Lampiran 2 Communalities
- Lampiran 2 Scree Plot
- Lampiran 3 Total Variance Explained
- Lampiran 3 Component Matrix^a
- Lampiran 4 Rotated Component Matrix^a
- Lampiran 4 Component Transformation Matrix
- Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas dengan dengan Histogram
- Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot
- Lampiran 6 Hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
- Lampiran 6 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients
- Lampiran 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot
- Lampiran 7 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary
- Lampiran 8 Hasil Analisis Regresi Coefficients
- Lampiran 8 Hasil Uji_t Statistik Coefficients
- Lampiran 8 Hasil Uji_F Statistik ANOVA
- Lampiran 9 Koefisien Determinasi Model Summary

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta kesempatan yang diberikan pada hari ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul yang penulis ajukan adalah *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah Di Kabupaten Langkat”*. Penulis menyadari bahwa untuk pembuatan skripsi ini nantinya akan menghadapi banyak permasalahan dan kesulitan, yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Bakhtiar Efendi, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Dr. M. Toyib Daulay, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing I yang dengan cermat dan tanpa pernah bosan memberikan kritikan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Rahmat Sembiring, S.E., M.SP selaku Dosen Pembimbing II yang dengan cermat telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para dosen dan pegawai Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak menyumbangkan ilmu pengetahuannya, membimbing selama proses perkuliahan hingga terciptanya suatu motivasi dan kesadaran pada diri penulis agar dapat membangun diri menghadapi perubahan-perubahan yang akan datang.
7. Kepada Bapak dan Ibu saya serta saudara-saudara saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.
8. Semua sahabat-sahabat dan rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu selama penyusunan skripsi ini.

Penulis serahkan segalanya demi tercapainya kesuksesan yang sepenuhnya. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, semoga bantuan tersebut mendapat amal yang berlipat ganda.

Medan, 12 Maret 2020

Akmal Hanafi Lubis
1415210034

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. Hasil dari penerimaan daerah dapat digunakan dalam membiayai pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan kegiatan sektor ekonomi di suatu daerah. Sumber-sumber dari adanya penerimaan daerah dapat dilihat dari pajak dan retribusi. Pajak perhotelan, pajak air bersih, pajak bumi dan bangunan dan berbagai pungutan sektor ekonomi lainnya. Tetapi penerimaan daerah sektor ekonomi belum mampu mengelola dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Hal ini menjadi sebuah penyebab bahwa sektor pariwisata menjadi sektor yang kurang berkembang dengan baik.

Lestari (2016), menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu penerimaan daerah yang sah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Peranan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri, sehingga dapat memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Dari segi ekonomi, pariwisata dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi penginapan/pesanggrahan/viila serta retribusi tempat rekreasi atau dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan mancanegara yang berkunjung. Keberhasilan dalam pengembangan sektor kepariwisataan akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah. Dimana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun internasional, tingkat hunian hotel, pendapatan perkapita, faktor keamanan, nilai kurs, serta investasi di industri pariwisata. Penerimaan daerah perlu terus diupayakan dengan peningkatan adanya penggalan potensi sumber-sumber dana yang ada sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya. Arlina (2013),

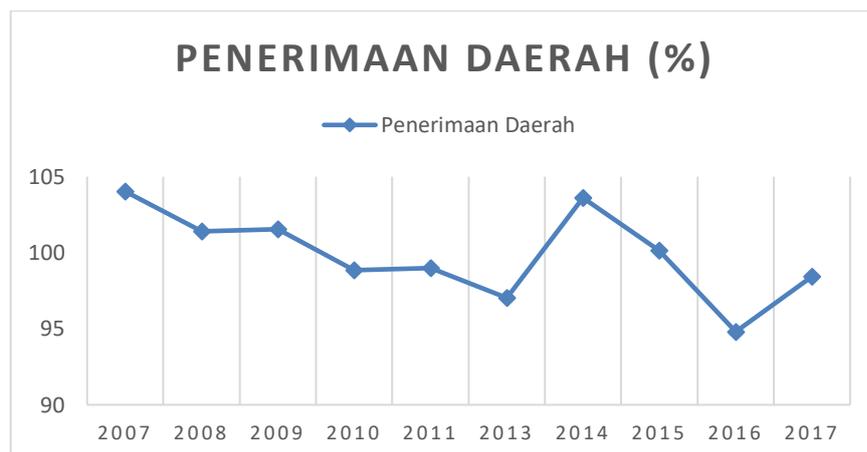
Harnyanti (2018), bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan daerah dalam rangka membiayai seluruh kegiatan pembangunan daerah dengan cara mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. Ketika suatu daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar dan selalu meningkat jumlah presentase pencapaian setiap tahunnya. Namun, ketika suatu daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan timbul masalah dan gejolak ekonomi yang tidak stabil di daerah tersebut. Oleh karena itu, besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu

daerah. Semakin besar jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti semakin besar pula kesempatan daerah tersebut untuk mengadakan perkembangan dan pembangunan daerah menuju penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Berikut ini adalah data penerimaan daerah di Kabupaten Langkat tahun 2007-2017.

**Tabel 1.1 Penerimaan Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2007-2017**

Tahun	Target (Miliar)	Realisasi (Miliar)	Persentase (%)
2007	787.803,36,00	818.789,13,00	104,03
2008	819.448,75,00	830.885,01,00	101,40
2009	876.735,68,00	890.337,15,00	101,55
2010	1.004.947,18,00	994.609,31,00	98,84
2011	1.121.589,52,00	1.108.552,89,00	98,99
2013	1.603.656,98,00	1.555.901,88,00	97,02
2014	1.623.707,89,00	1.682.148,38,00	103,06
2015	2.017.699,11,00	2.020.688,70,00	100,15
2016	2.336.327,10,00	2.215.047,13,00	94,81
2017	2.348.070,65,00	2.311.283,15,00	98,43

Sumber: BPS Kabupaten Langkat



**Gambar 1.1 Penerimaan Daerah (%) Kabupaten
Langkat Tahun 2007-2017**

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan daerah pada tahun 2007 sebesar 104,03%. Kemudian pada tahun 2008 realisasi penerimaan

daerah mengalami penurunan sebesar 101,40%. Dari target penerimaan daerah. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan daerah di Kabupaten Langkat mengalami penurunan sebesar 97,02% jauh dari target realisasi penerimaan daerah. Kemudian realisasi penerimaan daerah tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 94,81% jauh dari target penerimaan daerah. Tahun 2017 realisasi penerimaan daerah mengalami kenaikan sebesar 98,43% dibandingkan pada tahun 2016. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Sehingga realisasi penerimaan daerah tidak memenuhi dari target penerimaan daerah yang dicapai.

Dwita (2017), bahwa, walaupun realisasi dalam pencapaian anggaran pendapatan daerah telah tercapai namun belum mencerminkan keadaan perekonomian yang produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jika di analisa bahwa kurang stabilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sesuai dengan semangat perkembangan ekonomi saat ini yang seharusnya meningkat ke progres yang lebih baik dari pada tahun sebelumnya. Walaupun peningkatannya tidak secara signifikan namun seharusnya bisa meningkat secara terstruktur dari tahun ke tahun untuk menjaga kestabilan perekonomian daerah.

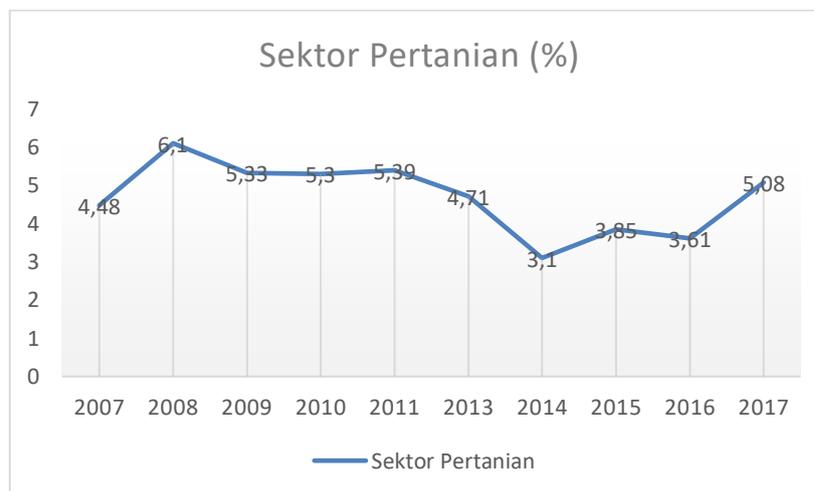
Hutasoit (2017), kekayaan sumber daya alam yang dimiliki kawasan Indonesia menjadikan Indonesia memiliki banyak potensi baik dalam sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, industri dan pariwisata. Selain sumber daya alam yang melimpah, unsur keindahan alam, keunikan budaya, peninggalan sejarah, keanekaragaman flora dan fauna serta keramahan penduduk Indonesia lokal yang menjadikan nilai tambah bagi sektor pariwisata Indonesia. Sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki bahan pangan mentah yang dapat diolah

untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Adanya sektor pertanian penting sekali bagi negara karena sumbangan pada sektor pertanian juga cukup besar bagi negara atau daerah. Berikut ini merupakan tabel 1.2 sektor pertanian di Kabupaten Langkat tahun 2007-2017.

**Tabel 1.2 Pertanian Kabupaten Langkat
Tahun 2007-2017**

Tahun	Pertanian (Miliar)	PDRB (Miliar)
2007	7.165,37,00	15.754,16,00
2008	7.602,28,00	16.553,44,00
2009	8.007,47,00	17.388,20,00
2010	8.432,19,00	18.386,04,00
2011	8.886,96,00	19.594,73,00
2013	9.810,50,00	22.029,48,00
2014	10.115,05,00	23.157,12,00
2015	10.504,66,00	24.321,61,00
2016	10.884,48,00	25.553,81,00
2017	11.437,57,00	26.823,48,00

Sumber: BPS Kabupaten Langkat



**Gambar 1.2 Sektor Pertanian (%) Kabupaten Langkat
Tahun 2007-2017**

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa sektor pertanian di Kabupaten Langkat pada tahun 2007 sebesar 4.48%. mengalami kenaikan pada tahun 2008

sebesar 6,1%. Kemudian sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 5,33% pada tahun 2009. Pada tahun 2012 perkembangan sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 5,42%. Pada tahun 2016 sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 3,61% dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 3,85%. Sementara itu pada tahun 2017 sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 5,08%. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Langkat mengalami gerakan berfluktuatif sehingga sektor pertanian menjadi salah satu sektor ekonomi dari indikator PDRB.

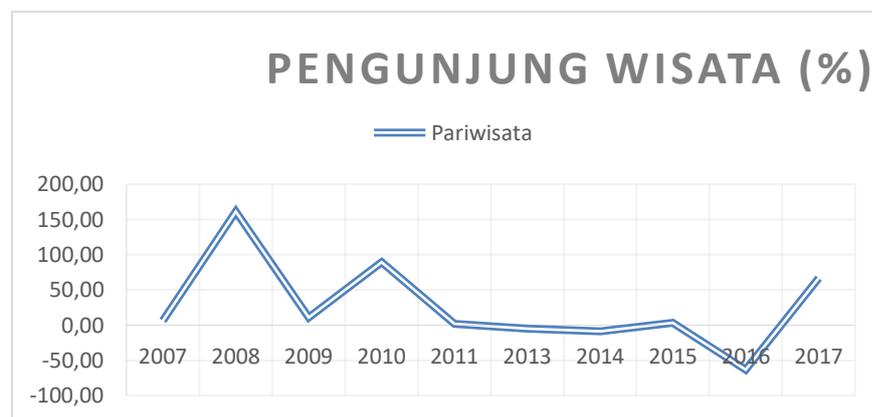
PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi yang memiliki trend hidup dan waktu senggang serta pendapatan (income) yang relatif besar. Artinya dengan kebutuhan hidup minimum yang sudah terpenuhi, mempunyai cukup uang untuk membiayai perjalanan wisata. Lestari (2013).

Saputro (2015), menjelaskan bahwa salah satu faktor yang membuat seseorang untuk mengunjungi suatu daerah adalah karena adanya obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi di daerah tersebut. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menciptakan atau membuka obyek-obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Berikut ini merupakan tabel 1.3 pariwisata di Kabupaten Langkat tahun 2007-2017.

Tabel 1.3 Pengunjung Wisata (Orang) Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017

Tahun	Mancanegara (Orang)	Domestik (Orang)	Jumlah (Orang)
2007	2.660	7.674	10.334
2008	3.290	23.707	26.997
2009	8.969	20.971	29.940
2010	8.834	47.810	56.644
2011	8.578	49.200	57.778
2013	7.091	46.709	53.800
2014	8.567	40.433	49.000
2015	3.495	47.139	50.634
2016	4.885	13.715	18.600
2017	8.396	22.604	31.000

Sumber: BPS Kabupaten Langkat



Gambar 1.3 Pengunjung Wisata (Orang) Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengunjung wisata di Kabupaten Langkat pada tahun 2007 sebanyak 10.334 pengunjung dengan persentase sebesar 6,57%. Kemudian pada tahun 2008 jumlah pengunjung wisatawan mengalami kenaikan signifikan sebanyak 26.997 pengunjung dengan persentase sebesar 161,24%. Pada tahun 2010 jumlah pengunjung wisata mengalami kenaikan sebanyak 56.664 pengunjung dengan persentase sebesar 89,19%. Kemudian pada tahun 2016 jumlah pengunjung wisata mengalami penurunan signifikan sebesar 18.600 pengunjung dengan persentase sebesar

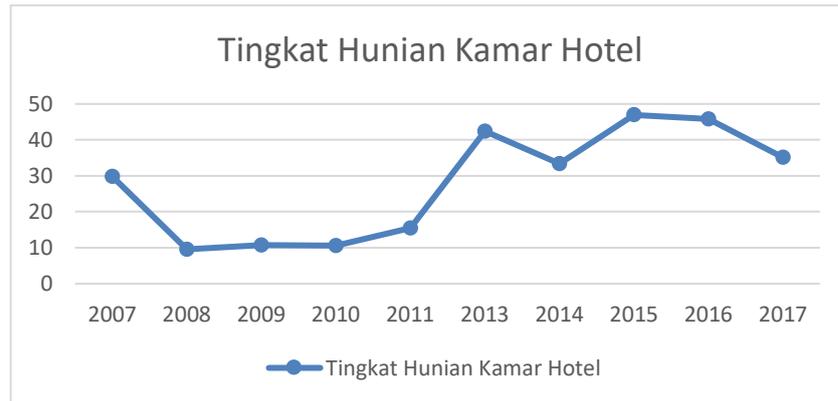
-63,26% dibandingkan pada tahun 2015 sebanyak 50.634 pengunjung. Tahun 2017 jumlah pengunjung wisata mengalami kenaikan sebanyak 31.000 pengunjung dengan persentase sebesar 66,96%. Dapat disimpulkan bahwa jumlah pengunjung wisata di Kabupaten Langkat tidak stabil dimana jumlah pengunjung wisata tidak selalu ramai setiap tahun.

Qadarrochman (2015), bahwa peranan pariwisata dalam pembangunan negara pada garis besarnya dilihat dari tiga segi, yaitu segi ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kepada wisatawan-wisatawan asing). Para pakar ekonomi memperkirakan sektor pariwisata akan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting pada abad ke-21. Dalam perekonomian suatu negara, bila dikembangkan secara berencana dan terpadu, peran sektor pariwisata akan melebihi sektor migas (minyak bumi dan gas alam) serta industri lainnya.

**Tabel 1.4 Tingkat Hunian Kamar Hotel (%)
Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017**

Tahun	Tingkat Penghunian Kamar Hotel (%)
2007	29.76
2008	9.57
2009	10.72
2010	10.61
2011	15.48
2013	42.47
2014	33.44
2015	46.93
2016	45.86
2017	35.19

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara



**Gambar 1.4 Tingkat Hunian Kamar Hotel (%)
Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017**

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa rata-rata inap tamu hotel di Kabupaten Langkat pada tahun 2007 dengan persentase sebesar 29.76% Kemudian pada tahun 2008 rata-rata inap tamu hotel mengalami penurunan sebesar 9,57%. Kemudian pada tahun 2014 rata-rata inap tamu hotel mengalami kenaikan signifikan sebesar 33,44%. Dibandingkan tahun 2013 rata-rata inap tamu hotel sebesar 42,47%. Tahun 2017 rata-rata inap tamu hotel mengalami penurunan dengan persentase sebesar 35,17% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 45,86%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan rata-rata inap tamu hotel mengalami gerakan flukutatif. Seperti pada tahun 2008 mengalami penurunan signifikan sebesar 9,57%. Kemudian tahun 2017 juga mengalami penurunan sebesar 35,19% dibandingkan tahun 2016 sebesar 45,86%.

**Tabel 1.5 Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata
Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017**

Tahun	Pajak Hotel (Ribu Rupiah)	Pajak Restoran (Ribu Rupiah)	Pajak Hiburan (Ribu Rupiah)
2007	21.000.000,00	268.788.234,00	6.820.080,00
2008	25.500.000,00	560.215.477,00	6.470.000,00
2009	10.500.000,00	417.489.053,00	10.490.000,00
2010	30.100.000,00	491.663.242,00	10.265.000,00
2011	30.200.000,00	502.100.374,00	11.555.000,00
2013	30.775.000,00	860.561.328,00	10.260.000,00
2014	30.250.000,00	902.386.752,00	14.095.000,00
2015	50.720.000,00	1.196.220.612,00	18.010.000,00
2016	53.340.000,00	1.704.340.017,00	27.105.000,00
2017	51.350.000,00	2.418.862.300,00	30.815.000,00

Sumber: BPS Kabupaten Langkat

Dari tabel 1.5 diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat penerimaan daerah di Kabupaten Langkat di sektor pariwisata adalah pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Untuk penerimaan daerah dari pajak hotel pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp.51.350.000,00 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp.53.340.000,00 Kemudian untuk penerimaan daerah dari pajak restoran pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.418.862.300,00 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp.1.704.340,017,00. Kemudian untuk penerimaan daerah dari pajak hiburan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp.30.815.000,00 dibandingkan pada tahun 2016 sebesar Rp.27.105.000,00 dapat disimpulkan bahwa penerimaan daerah dari sektor pariwisata cenderung berfluktuatif sehingga penerimaan daerah dari sumber pajak pariwisata tidak selalu mengalami peningkatan pada tiga jenis pajak secara bersama-sama.

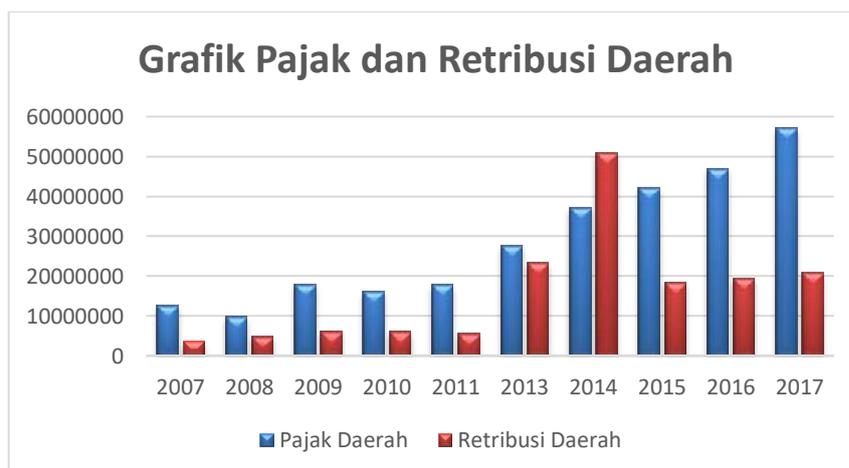
Windriyaningrum (2013), semakin lama wisatawan menginap dalam setiap kunjungan wisata maka secara langsung pengaruh ekonomi dari keberadaan wisatawan tersebut juga semakin meningkat. Sehingga akan meningkatkan

penerimaan daerah dari jumlah kunjungan wisatawan yang menginap di hotel. Wisatawan sebagai pelancong ke daerah yang dituju merupakan hal penting dalam meningkatkan peredaran uang dari sektor penginapan dan akomodasi lainnya. Semakin banyak kamar hotel yang terjual, maka akan semakin besar pula pendapatan yang akan diterima oleh pengelola hotel. Hal ini akan meningkatkan penerimaan daerah dari tingkat hunian hotel.

**Tabel 1.6 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017**

Tahun	Pajak Daerah (Miliar)	Retribusi Daerah (Miliar)
2007	12.636.888.524,00	3.750.162.888,00
2008	9.853.627.105,00	4.892.798.469,00
2009	17.988.084.889,00	6.241.548.608,00
2010	16.249.676.000,00	6.087.670.211,00
2011	17.818.656.067,00	5.558.807.798,00
2013	27.682.021.547,00	23.293.910.248,00
2014	37.150.151.469,00	50.817.560.042,00
2015	42.304.284.902,00	18.370.307.878,00
2016	46.948.822.153,00	19.471.687.021,00
2017	57.043.425.625,00	20.765.880.952,00

Sumber: BPS Kabupaten Langkat



**Gambar 1.5 Grafik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Miliar)
Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017**

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Langkat setiap tahun mengalami kenaikan dengan pajak daerah tahun 2017 sebesar Rp.57.043.425.625,00 miliar. Sementara itu pajak daerah tahun 2016 sebesar Rp.46.948.822.153,00 miliar. Retribusi daerah tahun 2014 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp.50.817.560.042,00 miliar kemudian mengalami penurunan sebesar Rp.18.370.307.878,00 miliar. Untuk tahun 2015 hingga tahun 2017 retribusi daerah mengalami kenaikan hingga Rp.20.765.880.952,00 miliar tahun 2017. Dapat disimpulkan bahwa perbandingan pajak daerah dan retribusi daerah penerimaan tiap tahun selalu lebih banyak penerimaan pajak daerah dibandingkan retribusi daerah.

Mubasiroh (2018), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah pajak daerah menjadi peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Karena penerimaan daerah dari sektor pajak akan digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini pajak daerah merupakan sumber yang dipungut oleh masyarakat atas penggunaan barang atau lahan di suatu daerah pada tahun tertentu.

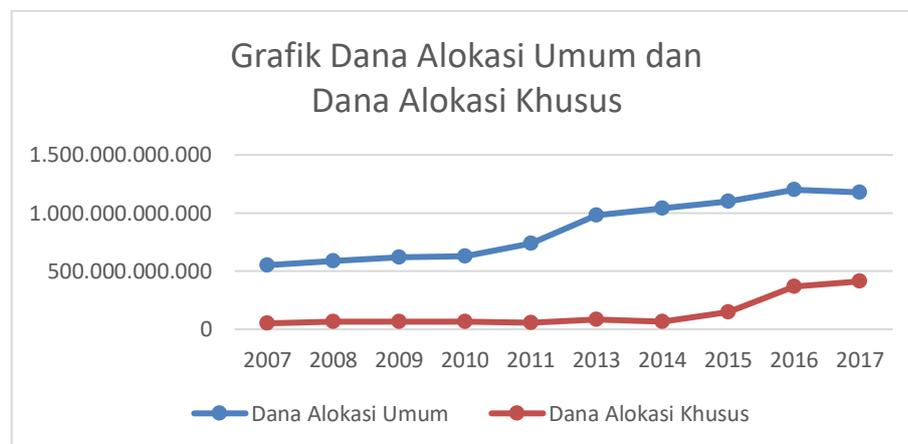
Siagian (2018), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sehingga retribusi berperan sebagai penerimaan daerah dalam satu tahun tertentu. peran

retribusi memiliki target yang dikutip kepada masyarakat setiap tahun sehingga pungutan dari retribusi tersebut dapat direalisasikan dalam satu tahun tertentu.

Tabel 1.7 Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017

Tahun	Dana Alokasi Umum (Miliar)	Dana Alokasi Khusus (Miliar)
2007	551.230.978.000,00	50.441.000.000,00
2008	589.366.556.000,00	64.975.000.000,00
2009	619.729.900.000,00	63.972.000.000,00
2010	628.952.504.000,00	65.865.700.000,00
2011	736.887.815.640,00	53.872.700.000,00
2013	982.658.132.000,00	81.165.730.000,00
2014	1.039.650.946.000,00	67.162.550.000,00
2015	1.099.486.754.000,00	146.253.880.000,00
2016	1.200.481.463.000,00	366.784.373.410,00
2017	1.179.392.864.000,00	411.765.101.584,00

Sumber: BPS Kabupaten Langkat



Gambar 1.6 Grafik Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Miliar) Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa dana alokasi umum kabupaten langkat mengalami penurunan. Tahun 2017 dana alokasi umum mengaami penurunan sebesar Rp.1.179.392.864.000,00 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp.1.200.481.463.000,00. Kemudian untuk dana alokasi khusus mengalami gerakan berflutuatif dimana tahun 2017 dana alokasi khusus mengalami kenaikan

sebesar Rp.411.765.101.584,00 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp.366.784.373.410,00. Perbandingan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus masih lebih banyak dana alokasi umum. Hal ini membuktikan bahwa dana alokasi umum mampu mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan daerah di Kabupaten Langkat.

Mubasiroh (2018), dana alokasi umum dimaksudkan untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sehingga dalam pembagian Dana Alokasi Umum perlu memperhatikan potensi daerah, kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah di daerah dan ketersediaan APBN. Prinsip alokasi Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika potensi daerah kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

Siagian (2018), dana alokasi khusus memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis berusaha untuk membahas masalah ini menjadi sebuah penelitian, dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah di Kabupaten Langkat”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan sektor pertanian mengalami penurunan pada tahun 2017.
- b. Tingkat hunian kamar hotel di Kabupaten Langkat mengalami penurunan pada tahun 2017.
- c. Penerimaan daerah dari pajak hotel mengalami penurunan pada tahun 2017.
- d. Dana alokasi umum mengalami penurunan tahun 2017.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan maka penelitian ini dibatasi menyangkut sektor pertanian, sektor pariwisata, tingkat hunian hotel, pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan penerimaan daerah di Kabupaten Langkat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor manakah (pertanian, pariwisata, tingkat hunian hotel, pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus) yang relevan dalam mempengaruhi penerimaan daerah di Kabupaten Langkat?
2. Apakah faktor yang relevan tersebut berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Langkat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor manakah (pertanian, pariwisata, tingkat hunian hotel, pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus) yang relevan dalam mempengaruhi penerimaan daerah di Kabupaten Langkat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang relevan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Langkat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, dapat memperdalam pengetahuan dalam bidang yang diteliti, baik secara teori maupun praktek lapangan.
- b. Bagi pemerintah, sebagai masukan bagi pemerintah daerah di Kabupaten Langkat agar dapat melaksanakan suatu kebijakan selanjutnya.
- c. Bagi pembaca, sebagai acuan dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi mengenai faktor pertanian pariwisata tingkat hunian hotel, pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus yang relevan dalam mempengaruhi penerimaan daerah di Kabupaten Langkat.
- d. Bagi akademis, sebagai bahan referensi, sumber informasi dan perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Rini Haryani (2018) yang berjudul : “Analisis Sektor Pertanian Dan Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2017”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah di Kabupaten Langkat”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. **Variabel Penelitian** : Penelitian terdahulu menggunakan Sektor Pertanian dan Sektor Pariwisata sebagai variabel bebas, dan 1 (satu) variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu: pertanian, pariwisata, tingkat hunian hotel, pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan 1 (satu) variabel terikat yaitu penerimaan daerah.
2. **Waktu Penelitian** : Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2018 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.
3. **Lokasi Penelitian** : Lokasi penelitian terdahulu di Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan penelitian ini berada di Kabupaten Langkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Penerimaan Daerah

Arlina (2013), penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. menyatakan bahwa pada umumnya penerimaan pemerintah diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri.

Menurut Lestari (2016) menyatakan bahwa dalam mencari penerimaan daerah untuk Pendapatan Asli Daerah salah satunya dapat dilihat dari kondisi daya pajak daerah. Daya pajak merupakan pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak dan dibandingkan dengan potensi pajaknya (tax potential) yaitu sejumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari pajak (tax base) dikalikan tarifnya. kemampuan bayar pajak suatu daerah. Kemampuan bayar pajak suatu daerah lazim diukur dengan PDRB. Dana transfer pemerintah pusat dapat mempengaruhi daya pajak daerah melalui efek substitusi dan efek stimulasi. Efek substitusi ditemukan jika dana transfer

pemerintah pusat mengurangi daya pajak daerah, dengan kata lain terjadi penurunan dalam pengumpulan pajak. Hal ini disebabkan karena daerah mengadakan dana transfer pemerintah. Sedangkan efek stimulasi terjadi jika dana transfer pemerintah pusat mampu meningkatkan daya pajak daerah.

Menurut Arlina (2013) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber penerimaan daerah yaitu:

- a. Pajak Daerah, dapat didefinisikan sebagai pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomer 34 tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- b. Retribusi daerah, dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah sah, Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
 - 2) Jasa giro.
 - 3) Pendapatan Bunga.
 - 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2. Potensi Pendapatan Daerah

Menurut Haryanti (2018), bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi beberapa bidang sebagai berikut:

- a. Bidang pertanian, merupakan kegiatan mengolah tanah dan menanaminya dengan tanaman yang bermanfaat. Kegiatan pertanian memanfaatkan tanah yang subur di dataran rendah.
- b. Bidang perkebunan, usaha perkebunan dapat dilakukan di dataran tinggi maupun dataran rendah. Indonesia merupakan daerah yang potensial untuk usaha perkebunan karena tanahnya yang subur.
- c. Bidang peternakan, usaha peternakan haruslah memperhatikan lokasi yang tepat untuk menggembala ternaknya. Menggembala artinya mencari tempat untuk merumput atau makan binatang ternak. Daerah padang rumput sangat potensial untuk usaha peternakan sapi dan kambing.
- d. Bidang perikanan, merupakan usaha menangkap ikan baik di laut, sungai maupun danau. Jenis ikan air laut antara lain bandeng, pari serta teri. Sedangkan ikan air tawar antara lain lele, nila dan mas. Indonesia sangat potensial untuk usaha perikanan karena wilayah Indonesia sebagian besar adalah perairan. Ikan selain untuk dimakan juga dapat digunakan untuk iakn hiasan antara lain ikan koki, mas dan arwana. Ikan juga dapat di budi dayakan di tambang, empang maupun tambak.
- e. Bidang perdagangan, adalah usaha yang bermanfaat untuk di distribusikan dari produsen ke konsumen. Baik distribusi dari barang

kota ke desa maupun sebaliknya. Kegiatan perdagangan dapat dilakukan di pasar, keliling, swalayan atau membuka toko.

- f. Bidang perindustrian, merupakan usaha untuk menghasilkan barang. Industri membutuhkan bahan baku dan tenaga manusia. Untuk bahan baku industri memanfaatkan sumber daya alam yang ada sehingga biasanya lokasi industri dekat dengan lokasi bahan baku. Namun ada pula industri yang jauh dari lokasi bahan baku sehingga mendatangkan bahan baku dari tempat lain. Industri juga memanfaatkan tenaga manusia untuk proses pengolahan barang, pengoperasian mesin, mengatur perusahaan dan memasarkan barang, untuk itu dibutuhkan tenaga manusia yang cakap, terampil dan terlatih. Contoh industri antara lain industri tekstil, baja, sepatu makanan, dan obat. Industri juga dilakukan di rumahan (*home industry*).
- g. Bidang pertambangan merupakan usaha dengan memanfaatkan hasil bumi. Indonesia merupakan Negara yang kaya akan hasil tambang seperti pasir kuarsa, biji besi, minyak bumi, emas dan gas alam. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan di darat maupun laut.
- h. Bidang pariwisata, dalam kegiatan pariwisata banyak yang memanfaatkan potensi alam, sosial dan budaya. Alam yang indah sangat potensial untuk kegiatan wisata. Keanekaragaman seni dan budaya suatu daerah juga sangat potensial untuk pariwisata. Berbagai tarian adat, rumah adat, seni musik, makanan khas daerah merupakan contoh budaya yang potensial untuk kegiatan wisata.

**Tabel 2.1 Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata
Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017**

Tahun	Pajak Hotel (Ribuan Rupiah)	Pajak Restoran (Ribuan Rupiah)	Pajak Hiburan (Ribuan Rupiah)
2007	21.000.000,00	268 788 234,00	6 820.080,00
2008	25.500.000,00	560 215 477,00	6 470.000,00
2009	10.500.000,00	417 489 053,00	10.490.000,00
2010	30.100.000,00	491 663 242,00	10 265.000,00
2011	30.200.000,00	502 100 374,00	11 555.000,00
2013	30.775.000,00	860 561 328,00	10 260.000,00
2014	30.250.000,00	902 386 752,00	14 095.000,00
2015	50.720.000,00	1 196 220 612,00	18 010.000,00
2016	53.340.000,00	1 704 340 017,00	27 105.000,00
2017	51.350.000,00	2 418 862 300,00	30 815.000,00

Sumber : BPS. Kabupaten Langkat.

Dari tabel 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat penerimaan daerah dari sektor pariwisata adalah pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Untuk penerimaan daerah dari pajak hotel pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp.51.350.000,00 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp.53.340.000,00. Kemudian untuk penerimaan daerah dari pajak restoran pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.418.862.300,00 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp.1.704.340,017,00. Kemudian untuk penerimaan daerah dari pajak hiburan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp.30.815.000,00 dibandingkan pada tahun 2016 sebesar Rp.27.105.000,00 dapat disimpulkan bahwa penerimaan daerah dari sektor pariwisata cenderung berfluktuatif sehingga penerimaan daerah dari sumber pajak pariwisata tidak selalu mengalami peningkatan pada tiga jenis pajak secara bersama-sama.

Menurut Saputro (2015), bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu potensi yang sangat mendukung pasokan devisa negara secara nyata, langsung

maupun tidak langsung yang dapat dinikmati oleh para pelaku sektor tersebut secara riil. Bisnis pariwisata menjadi salah satu sektor penyumbang perolehan devisa yang cukup besar bagi negara khususnya wisatawan mancanegara. Sedangkan wisatawan domestik akan merupakan sumber PAD yang potensial pada era otonomi daerah yang terus dikembangkan karena peluang yang cukup besar. Pengeluaran dari wisatawan secara langsung ataupun tidak langsung merupakan sumber pendapatan dari beberapa perusahaan, organisasi, atau masyarakat perorangan yang melakukan usaha di sektor pariwisata. Jumlah wisatawan yang banyak merupakan pasar bagi produk lokal. Masyarakat secara perorangan juga mendapat penghasilan jika mereka bekerja dan mendapat upah dari pekerjaan tersebut. Pekerjaan disektor pariwisata sangat beragam, seperti pengusaha pariwisata, karyawan hotel dan restoran, karyawan agen perjalanan, penyedia jasa transportasi, pemandu wisata, penyedia souvenir, atraksi wisata, dan lain-lain.

3. Sumber Penerimaan Daerah

Menurut Saputro (2015), menjelaskan bahwa sumber penerimaan daerah dapat dibagi menjadi 2 macam berdasarkan sumber penerimaan yaitu:

- a. Pajak, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

- 1) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Sementara Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk

menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Pajak hotel 10%. Tarif pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaranyang dilakukan kepada hotel. Hotel termasuk jenis akomodasi yang dikelola secara komersial dan profesional, disediakan bagi setiap orang untuk mendapatkan pelayanan penginapan, makan dan minum serta pelayanan lainnya.

- 2) Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran merupakan tempat menyantap makanan dan/minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha boga atau chatering. Pajak restoran dikenakan tarif sebesar 10%. Tarif pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Restoran dapat berdiri sendiri dengan membangun tempat khusus. Sementara restoran yang berada di dalam sebuah hotel umumnya dikelola oleh hotel itu sendiri, dan manajemennya dibawah tanggung jawab departemen makanan dan minuman.
- 3) Pajak hiburan adalah pajak atas pennyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan / keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Pajak hiburan dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Tarif pajak hiburan dikenakan atas jumlah

pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan / menikmati hiburan.

- b. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya didasarkan atas objek, tetapi juga perbedaan atas pendekatan tarif. Oleh sebab itu, tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

Menurut Arraniry (2018) jenis retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Retribusi jasa umum antara lain adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.
- b. Retribusi jasa usaha antara lain adalah penyewaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintahan daerah, penyedia tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil dan penjualan bibit.
- c. Retribusi perizinan tertentu yang dimaksudkan adalah untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat

dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi, antara lain adalah izin mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan tanah.

4. Pertanian

Menurut Haryanti (2018), menyatakan bahwa kegiatan pertanian yang meliputi budaya bercocok tanam dan memelihara ternak merupakan kebudayaan manusia paling tua. Tetapi dibandingkan dengan sejarah keberadaan manusia, kegiatan bertani ini termasuk masih baru. Sebelumnya, manusia hanya berburu hewan dan mengumpulkan bahan pangan untuk dikonsumsi. Berbagai teknologi pertanian dikembangkan guna mencapai produktivitas yang diinginkan. Di lain pihak, ilmu pertanian pun berkembang. Ilmu pertanian kemudian tumbuh bercabang-cabang, terspesialisasi, seperti misalnya agronomi, ilmu tanah, sosial ekonomi, proteksi tanaman, dan sebagainya. Kemajuan ilmu dan teknologi, peningkatan kebutuhan hidup manusia, memaksa manusia untuk memacu produktivitas menguras lahan, sementara itu daya dukung lingkungan mempunyai ambang batas toleransi. Sehingga, peningkatan produktivitas akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, yang pada ujungnya akan merugikan manusia juga. Di zaman sekarang kita dihadapkan pada banyaknya jenis dan macam pekerjaan. Pekerjaan atau mata pencaharian seseorang kian bertambah banyak sesuai dengan bertambahnya penduduk dan semakin khususnya keahlian seseorang.

Menurut Diwita (2017), bahwa ada beberapa macam pertanian dalam bidang pengelolaan adalah antara lain:

- a. Pertanian tradisional (Subsistem), Produksi pertanian tradisional, apabila produksi pertanian dan konsumsi sama banyaknya dan hanya satu atau dua macam tanaman saja (padi atau jagung) yang merupakan sumber pokok bahan makanan. Produksi dan produktivitas rendah karena hanya menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Penggunaan modal sedikit, sedang tanah dan tenaga kerja manusia merupakan faktor produksi yang dominan.
- b. Pertanian tradisional menuju modern, merupakan penganekaragaman pertanian menjadi suatu langkah utama yang cukup logis dalam masa transisi pertanian tradisional ke pertanian modern. Tanaman-tanaman pokok tidak lagi mendominasi produksi pertanian, karena tanaman-tanaman perdagangan yang baru seperti buah-buahan, teh, kopi, dan lain-lain. Sudah mulai dijalankan bersama dengan usaha peternakan sederhana.
- c. Pertanian modern, merupakan spesialisasi tingkat pertanian yang paling maju. Keadaan demikian bisa dilihat di negara-negara yang paling maju. Pertanian berbeda-beda berdasarkan ukuran dan fungsinya.

5. Sektor Pertanian menurut PDRB

Irawan (2013), bahwa dalam penyajiannya, PDRB selalu dibedakan atas dua, yakni atas dasar harga konstan dan atas dan dasar harga berlaku. Adapun definisi pembagian PDRB ini adalah sebagai berikut:

- a. PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

- b. PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap. Nilai PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena nilai PDRB atas dasar harga konstan ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat besarnya perekonomian suatu daerah.

Menurut Dimiyati (2004), dalam perhitungan PDRB, seluruh lapangan usaha dibagi menjadi Sembilan sektor, yaitu :

- a. Pertanian,
- b. Pertambangan dan Penggalian,
- c. Industri Pengolahan,
- d. Listrik, gas dan air minum,
- e. Bangunan,
- f. Perdagangan, hotel dan restoran,
- g. Angkutan dan komunikasi,
- h. Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan,
- i. Jasa-jasa.

Menurut Priyono (2011), menjelaskan bahwa PDRB merupakan nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode. Nilai bersih tersebut sebenarnya merupakan balas jasa dari faktor yang ikut serta dalam proses produksi yang terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan serta ditambah dengan penyusutan barang modal dan pajak tidak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Balas jasa faktor produksi, penyusutan dan jasa tidak

langsung tadi dalam pergerakan sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto sehingga PDRB atas harga pasar tersebut juga merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan ekonomi.

Tabel 2.2 Produksi Pertanian Karet dan Kelapa Sawit Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017

Tahun	Karet (Ton)	Kelapa Sawit (Ton)
2007	29.583,00	534.762,00
2008	29.460,00	535.814,00
2009	67.999,00	557.222,00
2010	59 586,94	611 391,60
2011	60 907,54	598 073,30
2012	55 834,17	633 047,00
2013	60 283,09	708 809,40
2014	59 758,98	710 656,50
2015	58 943,10	714 192,28
2016	58 581,87	747 619,40
2017	58 749,20	751 413,46

Sumber : BPS. Kabupaten Langkat

Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat hasil produksi pertanian karet dan kelapa sawit di kabupaten Langkat. Untuk hasil produksi karet pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 58.749,20 ton dibandingkan tahun 2016 seberat 58.581,87 ton. Kemudian untuk pertanian kelapa sawit pada tahun 2017 mengalami kenaikan seberat 751.413,46 ton dibandingkan pada tahun 2016 seberat 747.619,40 to. Dapat disimpulkan bahwa hasil produksi pertanian untuk komoditi karet dan kelapa sawit adalah jenis komoditi pertanian dengan hasil produksi yang unggul di Kabupaten Langkat.

6. Pariwisata

Arlina (2013), bahwa pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olah raga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain, bukanlah merupakan kegiatan yang baru saja dilakukan oleh manusia masa kini. Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Kepariwisataan itu sendiri merupakan pengertian jamak yang diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata, yang dalam bahasa Inggris disebut *tourism*. Dalam kegiatan kepariwisataan ada yang disebut wisata yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata yang merupakan tujuan wisatawan. Haryanti (2018),

Arlina (2013), menyatakan bahwa wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya (hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat tersebut. Jadi pada dasarnya, semua orang yang melakukan perjalanan wisata dinamakan wisatawan. Apapun tujuannya yang penting, perjalanan itu bukan untuk menetap dan tidak untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjungi.

Qadarrochman (2015), seseorang dapat melakukan perjalanan dengan berbagai cara karena alasan yang berbeda-beda pula. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu:

- a. Harus bersifat sementara.
- b. Harus bersifat sukarela (voluntary) dalam arti tidak terjadi paksaan.
- c. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

7. Jenis-Jenis Pariwisata

Qadarrochman (2015), banyak jenis wisata ditentukan menurut motif tujuan perjalanan, dapat dibedakan adanya beberapa jenis pariwisata khusus sebagai berikut:

- a. Pariwisata untuk menikmati perjalanan dilakukan untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi keingintahuan, mengendorkan ketegangan saraf, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, dan mendapatkan kedamaian.
- b. Pariwisata untuk rekreasi dilakukan sebagai pemanfaatan hari-hari libur untuk beristirahat, memulihkan kesegaran jasmani dan rohani dan menyegarkan keletihan.
- c. Pariwisata untuk kebudayaan ditandai serangkaian motivasi seperti keinginan belajar di pusat riset, mempelajari adat-istiadat, mengunjungi monumen bersejarah dan peninggalan purbakala dan ikut festival seni musik.
- d. Pariwisata untuk olahraga dibagi menjadi dua kategori, yakni pariwisata olahraga besar seperti Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games serta buat mereka yang ingin berlatih atau mempraktikkan sendiri, seperti mendaki gunung, panjat tebing, berkuda, berburu, rafting, dan memancing.

- e. Pariwisata untuk urusan usaha dagang umumnya dilakukan para pengusaha atau industrialis antara lain mencakup kunjungan ke pameran dan instalasi teknis.
- f. Pariwisata untuk berkonvensi berhubungan dengan konferensi, simposium, sidang dan seminar internasional.

Tabel 2.3 Objek Wisata di Kabupaten Langkat Menurut Nama Objek Wisata Kecamatan dan Potensi Wisata

No	Nama Objek Wisata	Kecamatan	Jenis Objek
1	Kolam Abadi Langkat	Sei Bingei	Alam
2	Air Terjun Siluman	Sei Bingei	Alam
3	Namu Sira-Sira	Sei Bingei	Alam
4	Masjid Raya Binjai	Wampu	Sejarah dan Budaya
5	Arung Jeram Sungai Bingei	Sei Bingei	Alam
6	Tangkahan CRU	Batang Serangan	Satwa dan Alam
7	Air Terjun Pantai Salak	Batang Serangan	Alam
8	Air Terjun Glugur	Batang Serangan	Alam
9	Air Terjun Saringgana	Bahorok	Alam
10	Bukit Lawang	Bahorok	Sejarah dan Alam
11	Sungai Landak Bahorok	Bahorok	Alam
12	Air Panas Simolap	Kutambaru	Alam
13	Rumah Pohon Habitat	Salapian	Alam
14	Lau Kulap	Kuala	Alam
15	The Yo's Hill	Salapian	Alam
16	Air Terjun Tongkat	Sei Bingei	Alam
17	Air Terjun Teroh Teroh	Sei Bingei	Alam
18	Pulau Sembilan	Pangkalan Susu	Alam
19	Air Terjun Lau Berte	Sei Bingei	Alam
20	Wisata Mangrove	Pangkalan Brandan	Alam
21	Penatapan Pamah Simelir	Sei Bingei	Alam
22	One Heart Hill	Sei Bingei	Alam
23	Bat Cave Lawang	Bahorok	Alam
24	Kuil Shri Raja Rajeshwari Amman Kovil	Selesai	Sejarah dan Budaya
25	Pantai Florida/ Pemandian Air Namu Ukur	Sei Bingei	Alam

Sumber: BPS, Kabupaten Langkat

Tabel 2.3 diatas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Langkat memiliki aneka macam objek wisata seperti objek wisata kolam abadi berada di Kecamatan Sei Binggei dengan objek wisata alam. Kemudian terdapat objek wisata yang berada di Kecamatan batang serangan dengan jenis objek sejarah dan budaya. Kemudian terdapat nama objek wisata tangkahan CRU yang berada di Kecamatan Batang Serangan dengan jenis objek satwa dan alam. Banyaknya jenis objek wisata merupakan objek yang dapat menarik wisatawan ke Kabupaten Langkat.. Dengan adanya objek wisata di setiap Kecamatan diharapkan yang dapat melestarikan dan mempertahankan budaya, alam, satwa serta aktivitasnya yang dapat memberikan nilai baik bagi para pengunjung wisata untuk mengenal Kabupaten Langkat.

8. Pengembangan Pariwisata

Haryanti (2018), pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat. Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni, dan alam (pesona alam). Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antara pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata.

Menurut Joyo Suharto dalam Haryanti (2018) bahwa terdapat modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan ada tiga, yaitu:

- a. Modal dari potensi alam Maksud alam disini adalah alam fisik, fauna dan floranya. meskipun sebagai atraksi wisata ketiga-tiganya selalu

berperan bersama, bahkan biasanya juga bersamasama dengan modal kebudayaan dan manusia, akan tetapi tentu ada salah satu modal yang menonjol peranannya. Alam menarik bagi wisatawan karena, banyak wisatawan tertarik oleh kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di alam terbuka. Dalam kegiatan pariwisata jangka pendek, pada akhir pekan atau dalam masa liburan, orang sering mengadakan perjalanan sekadar untuk menikmati pemandangan atau suasana pedesaan atau kehidupan diluar kota. Banyak juga wisatawan yang mencari ketenangan ditengah alam yang iklimnya nyaman, suasananya tentram, pemandangannya bagus dan terbuka luas.

- b. Modal dari potensi kebudayaan Maksud dari kebudayaan disini adalah kebudayaan dalam arti luas, tidak hanya meliputi kebudayaan tinggi seperti kesenian atau perikehidupan keraton dan sebagainya, akan tetapi juga meliputi adat istiadat dan segala kebiasaan yang hidup ditengah-tengah suatu masyarakat. Modal kebudayaan itu penting untuk menarik wisata tamasya agar mereka dapat menikmati kebudayaan ditempat lain. Wisatawan tamasya (pleasure tourist) hanya tinggal disuatu tempat selama masih ada pemandangan lain, jadi harus ada cukup banyak atraksi untuk menahannya cukup lama disuatu tempat. Akan tetapi juga dapat diharapkan akan ada wisatawan rekreasi, yang menghasbiskan waktu senggangnya ditengah-tengah masyarakat dengan kebudayaannya yang dianggap menarik.
- c. Modal dari potensi manusia Bahwa manusia dapat menjadi atraksi wisata dan menarik kedatangan wisatawan bukan hal yang luar biasa, meskipun

gagasannya mungkin akan membuat orang tersentak, sudah tentu manusia sebagai atraksi wisata tidak boleh kedudukannya begitu direndahkan sehingga kehilangan martabatnya sebagai manusia.

Tabel 2.4 Pengeluaran Wisatawan Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017

Tahun	Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman (Miliar Rupiah)	Persentase (%)
2007	269.57,00	6.81
2008	289,67,00	7.46
2009	306,69,00	5.87
2010	328,17,00	7.00
2011	354,93,00	8.15
2012	390,10,00	9.91
2013	419,79,00	7.61
2014	446,87,00	6.45
2015	473,95,00	6.06
2016	510,44,00	7.70
2017	550,88,00	7.92

Sumber : BPS. Kabupaten Langkat

Dari Tabel 2.4 diatas dapat dijelaskan bahwa pengeluaran wisatawan di Kabupaten Langkat pada tahun 2007 sebanyak Rp.269.57,00 miliar dengan persentase 6.81% mengalami kenaikan tahun 2008 sebanyak Rp.289,67,00 dengan persentase 7.46%. Kemudian pengeluaran wisatawan tertinggi terjadi tahun 2012 sebanyak Rp.390,10,00 dengan persentase sebesar 9.91%. Kemudian untuk tahun 2017 pengeluaran wisatawan mengalami kenaikan sebanyak Rp.550,88,00 dengan persentase sebesar 7.92%. dapat disimpulkan bahwa pengeluaran wisatawan di Kabupaten Langkat yang membelanjakan untuk pengeluaran wisatawan berada pada golongan Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman. Karena pengeluaran wisatawan mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam berwisata.

9. Tingkat Hunian Kamar Hotel

Windriyaningrum (2013), bahwa tingkat hunian kamar adalah suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar-kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual. Pengertian rasio occupancy merupakan tolak ukur keberhasilan hotel dalam menjual produk utamanya, salah satunya yaitu kamar. ketika jumlah kamar hotel yang tersedia memadai, maka jumlah wisatawan yang berkunjung meningkat dan semakin banyak pula permintaan terhadap kamar hotel.

Susanto (2015), menjelaskan bahwa beberapa kondisi yang dapat menyebabkan adanya pengaruh tingkat hunian berpengaruh positif terhadap pendapatan hotel di Kabupaten Jember antara lain:

- a. Adanya kenaikan tarif selama kegiatan Bulan Berkunjung ke Jember sehingga dengan kenaikan tarif kamar hotel menyebabkan kenaikan pendapatan hotel.
- b. Pelayanan yang prima dari manajemen hotel dan rangkaian acara Bulan Berkunjung ke Jember seperti Jember Fashion Carnival, Jember City Carnival dan sejumlah kegiatan lainnya, juga membuat pengunjung memutuskan untuk menambah hari dalam menginap.
- c. Selama kegiatan Bulan Berkunjung ke Jember jumlah pemesanan kamar hotel meningkat dari beberapa pengunjung luar kota. Pemesanan kamar hotel untuk menginap juga menyebabkan kenaikan pendapatan hotel

Windriyaningrum (2013), bahwa saat hotel dikunjungi akan terasa nyaman untuk dihuni, mereka akan semakin nyaman untuk tinggal lebih lama lagi. Sehingga industri pariwisata dan kegiatan yang berkaitan dengan

penginapan yaitu hotel, baik berbintang atau melati akan memperoleh pendapatan pariwisata yang semakin tinggi jika wisatawan semakin lama menginap. Sehingga akan meningkatkan penerimaan daerah. Semakin meningkatnya kegiatan pariwisata, semakin menuntut keseriusan pengelola hotel dalam memperbaiki layanannya kepada para tamu agar tamu-tamu hotel tersebut merasa betah dan memutuskan lebih lama lagi untuk menginap di hotel yang mereka tempati. Semakin banyak kamar hotel yang terjual, maka akan semakin besar pula pendapatan yang akan diterima oleh pengelola hotel tersebut.

Menurut Windriyaningrum (2013), bahwa wisatawan sebagai orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dalam jangka waktu 24 jam dan maksimal 3 bulan di dalam suatu negeri yang bukan negeri di mana biasanya tinggal, mereka ini meliputi:

- a. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk bersenang-senang, untuk keperluan pribadi, untuk keperluan kesehatan.
- b. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk pertemuan, konferensi, musyawarah atau sebagai utusan berbagai badan/organisasi
- c. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dengan maksud bisnis pejabat pemerintahan dan militer beserta keluarganya yang ditempatkan di negara lain tidak termasuk kategori ini, tetapi bila mereka mengadakan perjalanan ke negeri lain, maka dapat digolongkan wisatawan.

Menurut Afriyani (2015), bahwa hotel merupakan suatu usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian dari padanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan

dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Fungsi hotel bukan saja sebagai tempat menginap untuk tujuan wisata namun juga untuk tujuan lain seperti manjalankan kegiatan bisnis, mengadakan seminar, atau sekedar untuk mendapatkan ketenangan. Perhotelan memiliki peran sebagai penggerak pembangunan daerah, perlu dikembangkan secara baik dan benar sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, PAD.

Tabel 2.5 Jumlah Kamar, Jumlah Tempat Tidur dan Tingkat Hunian Hotel Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017

Tahun	Jumlah Kamar Hotel	Jumlah Tempat Tidur Hotel	Tingkat Hunian Hotel (%)
2007	371	540	29.76
2008	363	532	9.57
2009	376	427	10.72
2010	325	325	10.61
2011	312	325	15,48
2012	441	582	45,24
2013	450	588	42,47
2014	451	651	33,44
2015	507	643	46,93
2016	474	672	45.86
2017	969	1.230	35.19

Sumber: BPS, Provinsi Sumatera Utara.

Dari tabel 2.5 diatas dapat diketahui bahwa rata-rata inap tamu hotel di Kabupaten Langkat mengalami gerakan berfluktuatif dimana tahun 2012 rata-rata inap tamu hotel mengalami kenaikan signifikan sebesar 2.46%. Kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1.73%. Kemudian untuk rata-rata inap tamu hotel nusantara dimana pada tahun 2010 mengalami penurunan terendah sebesar 1.13%. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan signifikan sebesar 2.12%. Sementara pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1.35%. Untuk rata-rata inap tamu hotel Mancanegara dimana tahun 2014

mengalami kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 3.67%. Kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2.75%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata inap tamu hotel dan akomodasi lainnya di Kabupaten Langkat rata-rata lama inap tamu hotel Mancanegara lebih lama dibandingkan dengan tamu hotel Nusantara.

10. Pajak Daerah

Menurut Setiawan (2010), Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan referensi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang ditujukan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Siagian (2018), menjelaskan bahwa terdapat jenis pajak yang dapat dibagi menjadi 2 jenis pajak yaitu:

- a. Pajak Daerah Provinsi yaitu, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

- b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota yaitu, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak parkir.

Tabel 2.6 Realisasi Penerimaan Rutin dari Pajak Daerah Otonom Kabupaten Langkat Tahun 2017

Jenis Pajak	Target (Miliar)	Realisasi (Miliar)	(%)
Pajak Hotel	50.000.000,00	51.350.000,00	102,70
Pajak Restoran	1.300.000.000,00	2.418.862.300,00	186,07
Pajak Hiburan	30.000.000,00	30.815.000,00	102,72
Pajak Reklame	1.200.000.000,00	902.249.650,00	75,19
Pajak Penerangan Jalan	23.500.000.000,00	30.353.508.355,00	129,16
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	50.000.000,00	674.007.686,00	134,80
Pajak Mineral bukan Logam & batuan	2.000.000.000,00	913.258.419,00	45,66
Pajak Parkir	8.000.000,00	8.877.000,00	110,96
Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	36.850.000,00	73,70
Pajak Air Tanah	520.000.000,00	626.745.374,00	120,53
BPHTB	6.500.000.000,00	5.927.906.057,00	91,20
Pajak PBB P2	15.000.000.000,00	15.098.995.784,00	100,66
Jumlah/Total	50.658.000.000,00	57.043.425.625,00	112,60

Sumber: BPS Kabupaten Langkat.

Berdasarkan tabel 2.6 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan daerah dari pajak terdiri dari 12 jenis pajak. Realisasi penerimaan daerah dari pajak daerah otonom tahun 2017 dengan total realisasi sebesar Rp.57.043.425.625,00 dengan persentase 112,60%. Untuk jenis pajak tertinggi yang direalisasi adalah jenis pajak penerangan jalan dengan realisasi sebesar Rp. 30.353.508.355,00. Sementara itu realisasi jenis pajak terendah adalah jenis pajak hiburan sebesar Rp.30.815.000,00 dapat disimpulkan bahwa

realisasi penerimaan daerah dari pajak otonom mencapai realisasi yang ditarget tahun 2017.

11. Retribusi Daerah

Menurut Siagian (2018), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Siagian (2018), retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, sedangkan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar.
- b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan

pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan atau pesanggarahan atau villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan.

- c. Retribusi perizinan tertentu, adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk mengatur dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan.

12. Dana Alokasi Umum

Menurut Mubasiroh (2013), dana alokasi umum adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari dana perimbangan dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya pengalokasian belanja modal suatu daerah. Dana alokasi umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya Dana Alokasi Umum untuk setiap daerah adalah celah fiskal (*fiscal gap*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Prinsip alokasi dana alokasi umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh dana alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika potensi daerah kecil

sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi dana alokasi umum yang relatif besar.

Menurut Fusanto (2018), daerah yang memiliki nilai celah *fiscal* sama dengan nol menerima dana alokasi umum sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima dana alokasi umum sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan salah satu alat bagi pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan di Indonesia yang tujuannya untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

13. Perhitungan Dana Alokasi Umum

Karyadi (2017), dana alokasi umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan dan pengalokasian Dana Alokasi Umum diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dalam PP Nomor 55 Tahun 2005, dijelaskan bahwa:

- a. Dana alokasi umum dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto.

- c. Proporsi dana alokasi umum antara Propinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

14. Dana Alokasi Khusus

Menurut Karyadi (2017), dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Wilayah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari dana alokasi khusus yang di transfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus di anggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Dana Alokasi Khusus memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

15. Faktor Yang Mempengaruhi Dana Alokasi Khusus

Menurut Siagian (2018), bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi penerimaan dana alokasi khusus yaitu:

- a. Masih banyaknya daerah tertinggal, dimana daerah tersebut kurang mampu dalam membiayai seluruh pengeluarannya. Dana alokasi khusus berperan mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat.

- b. Pembangunan yang tidak merata, dimana dana alokasi khusus menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah tertinggal.
- c. Masih banyaknya pengangguran, dana alokasi khusus dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan produktifitas perluasan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur sehingga akan mengurangi pengangguran.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dibuat untuk membandingkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang salah satu variabelnya sama dengan variabel penelitian yang akan dibuat. Sebagai acuan dari penelitian ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya yaitu:

Tabel 2.7 Penelitian Sebelumnya

NO	Nama, Tahun, judul	Variabel	Model Analisis	Hasil
1	Rini Haryanti (2018), Analisis Sektor Pertanian Dan Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2017.	(X1) Sektor Pertanian, (X2) Sektor Pariwisata (Y) PAD	Regresi Linear Berganda	Terdapat pengaruh sektor pertanian (X1), terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat (Y) hal tersebut dikarenakan Lampung Barat merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki sektor pertanian yang sangat luas terutama perkebunan kopi yang dapat meningkatkan PAD kabupaten Lampung Barat. Terdapat pengaruh Sektor Pariwisata (X2) terhadap pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat (Y) hal tersebut dikarenakan lampung barat memiliki potensi wisata Pantai dan wisata alam yang dapat

				meningkatkan PAD Kabupaten Lampung Barat.
2	Beatrik Okta Dwita (2017), Pengaruh Sektor Pertanian Dan Sektor Pengolahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pringsewu Periode 2009-2016 Dalam Persepektif Ekonomi Islam.	(X1) Sektor Pertanian (X2) Sektor Industri Pengolahan (Y) Pendapatan Asli Daerah	Regresi Linear Berganda	Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, sektor pertanian secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena sektor pertanian lebih berpartisipasi terhadap pengurangan pengangguran dan kesejahteraan masyarakat sehingga hanya cukup untuk meningkatkan pendapatan individu atau rumah tangga saja dan kurang memiliki pengaruh dengan pendapatan daerah.
3	Eko Saputro (2015) Analisis Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Sekabupaten/Kota Di Jawa Tengah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya .	(X1) Jumlah Wisatawan (X2) PDRB (X3) Investasi (X4) Jumlah Objek Wisata (Y) Penerimaan Daerah	Regresi Linear Berganda	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa jumlah wisatawan dan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata sedangkan jumlah obyek wisata dan investasi di industri pariwisata tidak berpengaruh terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata. pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa model regresi baik untuk dipergunakan untuk memprediksi penerimaan daerah sektor pariwisata.
4	Riska Arlina (2013), Analisis Penerimaan Daerah Dari Industri Pariwisata Di Provinsi DKI Jakarta Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.	(X1) jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, (X2) investasi di ndustri pariwisata, (X3) nilai kurs USD (X4) faktor keamanan (Y) Pendapatan Asli Daerah	Regresi Linear Berganda	variabel jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara serta nilai kurs USD menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan variabel investasi dibidang pariwisata dan faktor keamanan tidak berpengaruh signifikan. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, investasi dibidang pariwisata, nilai kurs USD, dan factor keamanan secara bersama-sama menunjukkan pengaruhnya terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta.

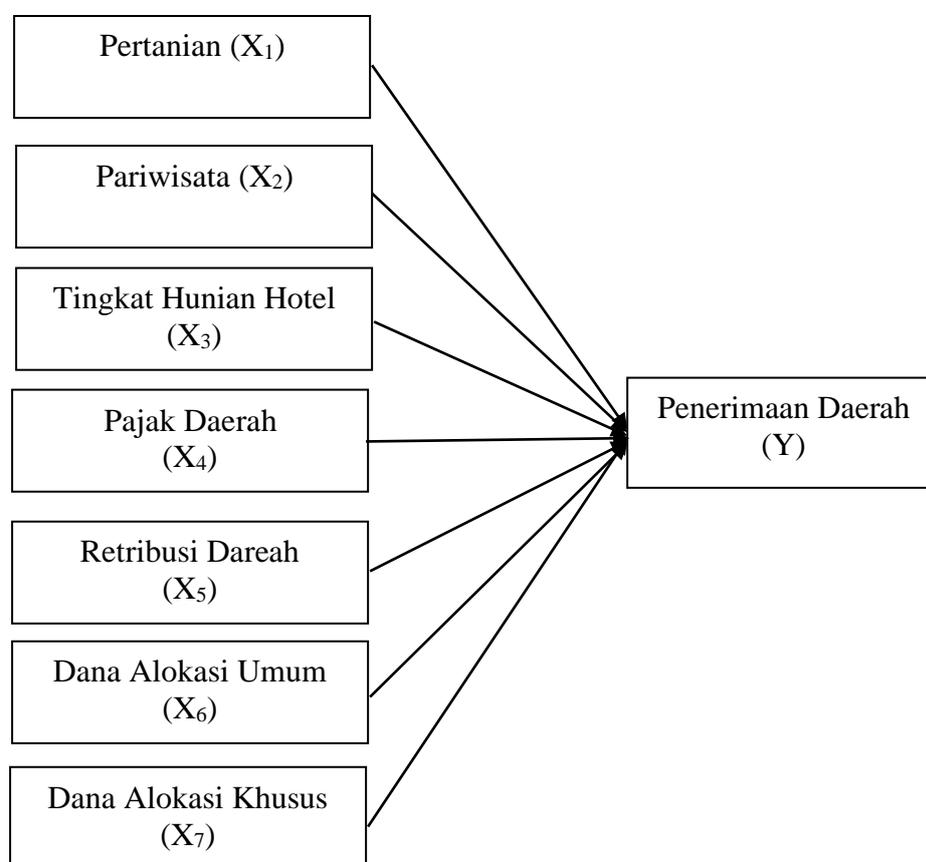
5	Nasrul Qadarochman (2015), Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kota Semarang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya	(X1) Jumlah Objek Wisata (X2) Jumlah Wisatawan (X3) Tingkat Hunian Hotel (X4) Pendapatan per kapita (Y) Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata	Regresi Linear Berganda	Hasil output regresi dari F-statistik menyimpulkan bahwa keempat variabel independen yaitu jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan pendapatan perkapita secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kota Semarang diterima.
6	Zelvian Shella (2014), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Kota Banda Aceh.	(X1) Jumlah Wisatawan (X2) Jumlah Objek Wisata (X3) Jumlah Hotel Lama Tinggal Wisatawan (Y) Penerimaan Sektor Pariwisata	Regresi Linear Berganda	Jumlah wisatawan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kota Banda Aceh periode tahun 1997-2012. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 2. Jumlah objek wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kota Banda Aceh periode tahun 1997-2012. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan.
7	Abdul Fiqih (2010), Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tangerang tahun 2004-2008.	(X1) Penerimaan Pajak Daerah (X2) Penerimaan Retribusi Daerah (X3) Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah BUMD (X4) Penerimaan Hasil-hasil Usaha yang sah. (Y) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	Regresi Linear Berganda	Variabel independent yaitu pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah dan pendapatan lain-lain yang sah secara simultan mampu menjelaskan dan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PAD sebesar 0,846 atau 84,6%. Sedangkan secara parsial hanya pajak dan pendapatan lain-lain yang sah yang berpengaruh signifikan, sedangkan dua variabel lain yaitu retribusi daerah dan hasil perusahaan milik daerah secara parsial kurang berpengaruh secara signifikan terhadap realisasi penerimaan PAD Kota Tangerang.
8	Suci Lestari (2016), Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Soppeng Periode 2005-2014.	(X1) Daya Pajak (X2) PDRB (X3) Jumlah Penduduk (Y) Pendapatan Asli Daerah	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel daya pajak, PDRB dan jumlah penduduk usia produktif berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sedangkan secara parsial, hanya variabel PDRB yang berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai koefisien sebesar 3,541 yang berarti bahwa apabila PDRB naik 1% maka PAD akan naik 3,541% . Sedangkan variabel lainnya yaitu daya pajak dan jumlah

				penduduk usia produktif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Dari hasil regresi, nilai R- Squared (R ²) sebesar 0,929.
9	Arief Eka Atmaja (2011), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Semarang.	(X1) Pengeluaran Pemerintah Daerah (X2) PDRB (X3) Jumlah Penduduk (Y) PAD	Regresi Linear Berganda	Dari hasil analisis dalam penelitian ini dapat di simpulkan, secara bersama-sama Variabel Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk dan PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara individual, Variabel Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk dan PDRB dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, yang memiliki pengaruh terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang adalah Jumlah Penduduk.
10	Esti Purwaningsih (2011), Analisis faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Sragen tahun 1991-2008.	(X1) Pendapatan Perkapita (X2) Jumlah Perusahaan (X3) Jumlah Penduduk (Y) Pendapatan Asli Daerah	Regresi Linear Berganda	Koefisien determinasi ganda sebesar 0,98, artinya model yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independent hanya mampu menjelaskan variabel dependent sebesar 98,4% sedangkan sisanya 1,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.
11.	Pujiono, Dodik Slamet (2016), Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Di Provinsi Maluku Utara).	Sistem Pengendalian Internal, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kinerja Pemerintah Daerah	Confirmatory Factor Analysis	Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Maluku Utara. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Maluku Utara. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Maluku Utara.
12.	Yoda, Tilawatil Ciseta (2014), Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Retribusi Pasar Di Kota Padang.	Sumber Daya Manusia, Pengelolaan (Manajemen, Regulasi, Pengawasan, Kesadaran wajib retribusi, Sarana dan prasarana	Confirmatory Factor Analysis	Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki tujuh variabel dengan indikator yang memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang. Pengelolaan memiliki empat variabel dengan indikator yang memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.

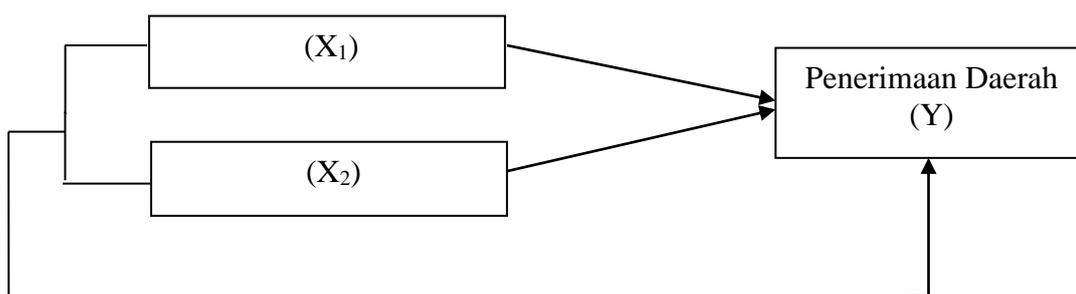
C. Kerangka Konseptual

Kerangka merupakan bagian dari suatu bentuk atau sistem sedangkan konsep merupakan acuan atau batasan dari teori yang ada. Jadi kerangka konseptual merupakan unsur dasar pokok dalam suatu penelitian dimana konsep teoritis akan berubah kedalam definisi operasional. Berdasarkan masalah yang ada maka dapat dibuat suatu kerangka fikir mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah di Kabupaten Langkat.

Berdasarkan uraian diatas kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual *Confirmatory Factor Analysis* (CFA)



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Setelah Uji CFA (Regresi Linier Berganda)

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013), mengemukakan bahwa hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak, dan dapat diterima apabila hipotesis tersebut dapat dibuktikan dengan pembuktian yang nyata dan empiris. Berdasarkan perumusan masalah, maka hipotesis penelitian adalah:

1. Semua faktor (pertanian, pariwisata, tingkat hunian hotel, pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus) yang relevan dalam mempengaruhi penerimaan daerah di Kabupaten Langkat.
2. Faktor yang relevan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Langkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian *explanatory* atau *confirmatory*, yakni untuk menjelaskan hubungan kasual dan pengujian hipotesis. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian *ex post facto*. Yaitu suatu penelitian yang datanya dikumpul setelah terjadinya suatu fakta atau peristiwa. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif/kuantitatif. Salah satu jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi (penjelasan) adalah penelitian asosiatif. Menurut Rusiadi (2014) “Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antar dua variabel atau lebih”.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Langkat dengan waktu penelitian direncanakan dari bulan Februari 2019 sampai dengan selesai, dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

No	Jenis Agenda	Tahun 2019 -2020																							
		Februari				Maret				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset Awal / Pengajuan Judul																								
2	Penyusunan Proposal																								
3	Perbaikan / Acc Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Pengolahan Data																								
6	Penyusunan Skripsi																								
7	Bimbingan																								
8	Acc Skripsi																								

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Operasional Variabel

Operasional variabel dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik dapat dilakukan dengan benar.

Operasional variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini akan disajikan dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Deskripsi	Indikator	Skala
Pertanian	Kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olah raga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain, Dwita (2017).	Hasil pertanian, kehutanan dan perikanan dengan pendekatan PDRB atas harga konstan di Kabupaten Langkat tahun 2007-2017.	Rasio
Pariwisata	Kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olah raga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain,. Arlina (2013).	Jumlah seluruh pengunjung Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Domestik di Kabupaten Langkat tahun 2007.2017.	Rasio
Tingkat Hunian Hotel	Keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar-kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual. Windriyaningrum (2013).	Tingkat hunian Kamar hotel di Kabupaten Langkat tahun 2007.2017.	Rasio
Pajak Daerah	Pajak yang dipungut oleh daerah seperti Provinsi, Kabupaten maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. Siagian (2018).	Realisasi pajak daerah Kabupaten Langkat tahun 2007-2017.	Rasio

Retribusi Daerah	Pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Siagian (2018).	Realisasi retribusi daerah Kabupaten Langkat tahun 2007-2017.	Rasio
Dana Alokasi Umum	Dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Fusanto (2018).	Realisasi dana alokasi umum Kabupaten Langkat tahun 2007-2017.	Rasio
Dana Alokasi Khusus	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional. Karyadi (2017).	Realisasi dana alokasi khusus Kabupaten Langkat tahun 2007-2017.	Rasio
Penerimaan Daerah	Uang yang masuk ke kas daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang sah dalam membiayai pembangunan daerah. Arlina (2013).	Realisasi penerimaan daerah di Kabupaten Langkat tahun 2007-2017.	Rasio

2. Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2013), variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih penulis yaitu Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah di Kabupaten Langkat, maka terdapat tujuh variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu:

a. Variabel Bebas atau *Independent Variable* (X)

Variabel bebas atau *independent variable* (X) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pertanian, (X_1), pariwisata (X_2), tingkat hunian hotel (X_3), pajak daerah (X_4), retribusi daerah (X_5), dana alokasi umum (X_6), dana alokasi khusus (X_7).

b. Variabel Terikat atau *Dependent Variable* (Y)

Variabel terikat atau dependent variable (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah penerimaan daerah (Y) Kabupaten Langkat.

D. Sumber Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis bersumber dari data yang diperoleh di Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, data tersebut berupa pertanian, pariwisata, tingkat hunian hotel, pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan penerimaan daerah di Kabupaten Langkat, dalam kurun waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2007-2017. Data yang diambil merupakan data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia di *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat dan BPS Provinsi Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengumpulkan data sekunder atau teori-teori yang akan digunakan sebagai bahan

pembandingan. Penulis mengadakan penelitian melalui buku-buku literatur, serta sumber-sumber lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis *Confirmatory Factor Analysis* (CFA)

Analisis faktor (*Factor Analysis*) merupakan suatu teknik statistik *multivariate* yang digunakan untuk mengurangi (*reduction*) dan meringkas (*summarization*) semua variabel terikat dan saling berketergantungan. Hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel yang lain yang akan diuji untuk diidentifikasi dimensi atau faktornya. (Ujianto, dan Abdulrachman, 2004).

Confirmatory Factor Analysis bertujuan untuk menemukan suatu cara meringkas informasi yang ada dalam variabel asli (awal) menjadi satu set dimensi baru atau *variate* (faktor) dengan rumus :

$$X_i = B_{i1} F_1 + B_{i2} F_2 + B_{i3} F_3 + \dots + V_i$$

Dimana:

X_i = Variabel ke-i yang dibakukan

B_{ij} = Koefisien regresi parsial yang untuk variabel i pada common factor ke-j

F_j = Common factor ke-i

V_i = Koefisien regresi yang dibakukan untuk variabel ke-i pada faktor yang unik ke-i

μ_i = Faktor unik variabel ke-i

Kriteria pengujian : faktor dinyatakan merupakan faktor dominan apabila memiliki koefisien komponen matrix $> 0,5$. Khusus untuk Analisis Faktor, sejumlah asumsi berikut harus dipenuhi (Santoso, 2006).

- a. Korelasi antar variabel independen. Besar korelasi atau korelasi antar independen variabel harus cukup kuat, misalnya di atas 0,5.
- b. Korelasi parsial. Besar Korelasi parsial, korelasi antar dua variabel dengan menganggap tetap variabel lain, justru harus kecil. Pada SPSS deteksi terhadap korelasi parsial diberikan lewat pilihan *anti image korelation*.
- c. Pengujian seluruh matriks korelasi (korelasi antar variabel, yang diukur dengan besaran *Bartlett Test of Sphericity* atau *Measure Sampling Adequacy* (MSA). Pengujian ini mengharuskan adanya korelasi yang signifikan di antara paling sedikit beberapa variabel.
- d. Pada beberapa kasus, asumsi Normalitas dari variabel-variabel atau faktor yang terjadi sebaiknya dipenuhi.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *Ordinary Least Square (OLS)*.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal. Asumsi ini harus terpenuhi untuk model regresi linier terbaik. Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal yang berbentuk

simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian *Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test* terhadap masing-masing variabel. Hipotesis dalam pengujian ini adalah:

- 1) $H_0 : F(x) = F_0(x)$, dengan $F(x)$ adalah fungsi distribusi populasi yang diwakili oleh sampel dan $F_0(x)$ adalah fungsi distribusi suatu populasi berdistribusi normal.
- 2) $H_1 : F(x) \neq F_0(x)$ atau distribusi populasi tidak normal.
- 3) Pengambilan keputusan.
 - a. Jika Probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima.
 - b. Jika Probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang signifikan antara variabel-variabel prediktor/independen dalam suatu model regresi linear berganda. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dalam penelitian ini dengan menggunakan *Tolerance and Variance Inflation Factor (VIF)*. *Rule of thumb* yang digunakan sebagai pedoman jika VIF dari suatu variabel melebihi 10, dimana hal ini terjadi ketika nilai R^2 melebihi 0,90 maka suatu variabel dikatakan berkorelasi sangat tinggi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian asumsi residual dengan *varians* tidak konstan. Jika *varians* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan *crosssection* mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, yang bertujuan melihat hubungan antara variabel dana alokasi umum (X_1), pariwisata (X_2), penerimaan daerah (Y) dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \mu_i$$

Dimana :

Y	= Penerimaan Daerah (Miliar Rupiah)
a	= Konstanta
X_1	= Dana Alokasi Umum (Miliar Rupiah)
X_2	= Pariwisata (Orang)
b_1 - b_2	= Koefisien regresi
μ_i	= variabel pengganggu

4. Uji Kesesuaian (*Rasio Goodness Of Fit*)

Goodness of Fit test yaitu persamaan regresi yang digunakan dalam proses perhitungan tidak selalu baik untuk mengestimasi variabel *dependen* terhadap variabel *independen*, oleh karena itu perlu diadakan pengujian *Goodness of Fit Test* dengan menggunakan alat bantu SPSS.

a. Uji Hipotesis Parsial (Uji - t)

Uji parsial atau biasanya lebih dikenal dengan uji t adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara terpisah/masing-masing/satu per satu. Sebagai

contoh kita punya variabel sektor pertanian (X_1), sektor pariwisata (X_2), dan penerimaan daerah (Y). yang dinamakan uji parsial yakni menerangkan pengaruh dari X_1 terhadap Y , atau X_2 terhadap Y .

Uji parsial dikatakan signifikan apabila:

- 1) Nilai t -hitung $>$ t -tabel, T hitung dapat diperoleh melalui uji manual (menghitung sendiri) ataupun melalui hasil pengolahan data seperti SPSS (pada tabel *coefficient* dengan nama t). Sedangkan t tabel diperoleh hanya melalui uji manual dengan melihat nilai pada tabel t .
- 2) Nilai signifikan harus $<$ derajat kepercayaan (umumnya derajat kepercayaan penelitian adalah 0,05) Nilai signifikan dapat diperoleh melalui uji manual maupun melalui hasil pengolahan SPSS (pada tabel *coefficient* dengan nama *sign*). Apabila nilai signifikansi sebesar 0,000 maka dikatakan sangat signifikan.

b. Uji Hipotesis Simultan (Uji - F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak/bersama-sama atau sekaligus.

Sebagai contoh uji X_1 dan X_2 secara serentak terhadap Y .

Uji simultan dikatakan signifikan apabila:

- 1) Nilai F hitung $>$ F tabel

F hitung dapat diperoleh melalui uji manual (menghitung sendiri) ataupun melalui hasil pengolahan data seperti SPSS (pada tabel ANOVA dengan nama F). Sedangkan F tabel diperoleh hanya melalui uji manual dengan nilai pada tabel F .

2) Signifikansi $F <$ derajat kepercayaan penelitian (0,05 pada umumnya)

Nilai signifikansi dapat diperoleh melalui uji manual maupun melalui hasil pengolahan SPSS (pada tabel ANOVA dengan nama sign).

Apabila nilai signifikansi sebesar 0,000 maka dikatakan sangat signifikan.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R^2 terletak antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya varians yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Langkat

Kabupaten Langkat merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten Langkat secara Geografis terletak 03°14'00' – 04°13'00'' Lintang Utara serta 93°51'00 – 98°45'00 Bujur Timur. Kabupaten Langkat memiliki wilayah Seluas 6.263,29 km² (626,329 Ha). Ibukota Kabupaten Langkat adalah Kecamatan Stabat. Secara administratif Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan dan 277 desa/Keluarahan definitif. Untuk batas wilayah sendiri di Sebelah Utara Kabupaten Langkat berbatasan langsung dengan Selat Malaka, di Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang, di Sebelah Barat Kabupaten Langkat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang (Provinsi Aceh) dan Di Sebelah Timur Kabupaten Langkat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk di Kabupaten Langkat di dominasi oleh etnis melayu, kemudian di ikuti dengan suku jawa, suku karo. Tapanuli/toba, madina dan lainnya. Orang melayu merupakan sub-etnis yang paling banyak bermukim disini. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2015, persentase agama penduduk

Kabupaten Langkat adalah Islam 90,60% kristen protestan 7,95%, khatolik 0,58%, budha 0,79%, hindu 0,4% dan konghucu 0,04%.

Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga, dan Penduduk Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah	
		Rumah Tangga	Penduduk (Jiwa)
Bahorok	1.101,83	10.331	42.328
Sirapit	98,50	4.111	16.900
Salapian	221,73	6.689	27.515
Kutambaru	236,84	3.454	14.238
Sei Bingai	333,17	12.526	51.491
Kuala	206,23	10.105	41.576
Selesai	167,73	18.140	73.731
Binjai	42,5	11.176	45.168
Stabat	108,85	21.623	87.527
Wampu	194,21	10.551	43.106
Batang Serangan	899,38	9.046	37.173
Sawit Seberang	209,10	6.587	26.751
Padang Tualang	221,14	12.223	49.549
Hinai	105,26	12.623	50.751
Secanggih	231,19	17.050	69.376
Tanjung Pura	179,61	17.019	68.464
Gebang	178,49	11.135	45.165
Babalan	76,41	14.628	59.905
Sei Lapan	280,68	12.223	49.704
Brandan Barat	89,80	5.738	23.294
Besitang	720,74	11.461	46.676
Pangkalan Susu	151,35	10.878	44.125
Pematang Raya	209,00	3.398	13.795
Langkat	6.263,29	252.715	1.028.309

Sumber: BPS Kabupaten Langkat, 2018

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa luas wilayah paling luas di Kabupaten Langkat berada di Kecamatan Bahorok seluas 1.101,83 km² dengan jumlah rumah tangga sebanyak 10.331 rumah tangga. untuk jumlah penduduk di Kecamatan Baharok sebanyak 42.328 jiwa. Kemudian Kecamatan dengan wilayah paling sedikit berada di Kecamatan Binjai dengan luas wilayah

seluas 42,5 km² dengan jumlah rumah tangga sebanyak 11.176 rumah tangga dan jumlah penduduk sebanyak 45.168 jiwa. Untuk di Kabupaten Langkat seluas 6.263,29 km² dengan jumlah rumah tangga sebanyak 250.971 rumah tangga dan jumlah penduduk sebanyak 1.028,309 jiwa.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk (Jiwa) berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Bahorok	21.214	21.114	42.328	100,47
Sirapit	8.515	8.385	16.900	101,55
Salapian	13.833	13.683	27.516	101,10
Kutambaru	7.232	7.006	14.238	103,23
Sei Bingai	25.676	25.815	51.491	99,46
Kuala	20.715	20.816	41.576	99,30
Selesai	37.108	36.623	73.731	101,32
Binjai	22.916	22.522	45.168	102,98
Stabat	43.320	44.207	87.527	97,99
Wampu	21.851	21.255	43.106	102,80
Batang Serangan	18.969	18.204	37.173	104,20
Sawit Seberang	13.406	13.345	26.751	100,46
Padang Tualang	24.691	24.858	49.549	99,33
Hinai	25.549	25.202	50.751	101,38
Secanggih	34.935	34.441	69.376	101,43
Tanjung Pura	34.537	33.927	68.464	101,80
Gebang	22.768	22.397	45.165	101,66
Babalan	30.494	29.411	59.905	103,68
Sei Lapan	25.312	24.392	49.704	103,77
Brandan Barat	11.958	11.336	23.294	105,49
Besitang	23.578	23.098	46.676	102,08
Pangkalan Susu	22.189	21.936	44.125	101,15
Pematang Raya	7.038	6.757	13.795	104,16
Langkat	517.804	510.505	1.028,309	101,43

Sumber: BPS, Kabupaten Langkat, 2018

Berdasarkan Uraian diatas dapat diketahui bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Langkat berjumlah 517 804 jiwa. Sedangkan penduduk perempuan berjumlah 510 505 jiwa. Bahwa di Kabupaten Langkat penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Untuk penduduk yang paling

banyak berada di Kecamatan Stabat dengan jumlah penduduk sebanyak 87.527 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 43.320 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 44.207 jiwa. Sedangkan penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Pematang Raya dengan jumlah penduduk sebanyak 13.795 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 7.038 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 6.757 jiwa.

Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk dan Rata-Rata Penduduk/Desa berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km²	Rata-rata Penduduk/Desa
Bahorok	38	2.228
Sirapit	172	1.690
Salapian	124	1.619
Kutambaru	60	1.780
Sei Bingai	155	3.218
Kuala	202	2.599
Selesai	440	5.267
Binjai	1.074	6.453
Stabat	804	7.294
Wampu	222	3.079
Batang Serangan	41	4.647
Sawit Seberang	128	3.822
Padang Tualang	224	4.129
Hinai	482	3.904
Secanggang	300	4.081
Tanjung Pura	381	3.603
Gebang	253	4.106
Babalan	784	7.488
Sei Lapan	177	3.550
Brandan Barat	259	3.328
Besitang	65	5.186
Pangkalan Susu	292	4.011
Pematang Raya	66	1.724
Langkat	164	3.712

Sumber: BPS, Kabupaten Langkat 2018

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Langkat paling sedikit berada di Kecamatan Bahorok

dengan kepadatan sebesar 38 per km². Dengan rata rata penduduk sebanyak 2.228 penduduk/desa. Untuk kepadatan penduduk yang paling besar berada di Kecamatan Binjai dengan kepadatan sebesar 1.074 per km². Dengan rata-rata penduduk sebanyak 6.453 penduduk/desa. Untuk kepadatan penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Langkat sebesar 164 per km². Dengan rata-rata sebanyak 3.712 penduduk/desa. Dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk di tiap kecamatan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang berbeda. Sehingga kepadatan penduduk menjadi ukuran untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk yang bermukim di suatu daerah.

Tabel 4.4 Komposisi Penduduk (Jiwa) menurut Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	53.071	51.220	104.291
5-9	54.046	52.187	106.233
10-14	51.069	48.782	99.851
15-19	47.284	44.478	91.762
20-24	43.660	42.291	85.951
25-29	40.318	39.456	79.774
30-34	38.272	38.838	77.110
35-39	36.615	37.718	74.333
40-44	34.651	34.471	69.122
45-49	31.692	31.796	63.488
50-54	27.422	27.148	54.570
55-59	22.345	21.826	44.171
60-64	15.286	15.071	30.357
65-69	9.525	10.074	19.599
70-74	6.177	7.136	13.313
75 ke atas	6.371	8.013	14.384
Jumlah	517.804	510.505	1.028.309

Sumber: BPS, Kabupaten Langkat, 2018

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa penduduk berusia 0-4 tahun dengan penduduk laki-laki berjumlah 53.071 jiwa dan penduduk

perempuan berjumlah 51.220 jiwa dengan total penduduk sebanyak 104.291 jiwa. Kemudian untuk penduduk berusia 15-19 tahun dengan penduduk laki-laki berjumlah 47.284 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 44.478 jiwa dengan total penduduk sebanyak 91.762 jiwa. Untuk penduduk berusia 50-54 tahun dengan penduduk laki-laki berjumlah 27.422 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 27.148 jiwa dengan total penduduk sebanyak 54.570 jiwa. Untuk penduduk berusia 75+ dengan penduduk laki-laki berjumlah 6.371 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 8.013 jiwa dengan total penduduk sebanyak 14.384 jiwa. Untuk jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Langkat berjumlah 517.804 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 510.505 jiwa. Dapat disimpulkan bahwa penduduk di Kabupaten Langkat lebih banyak pada golongan Usia Produktif. Bahwa penduduk berusia 0–4 tahun dan usia 5–9 tahun memiliki jumlah penduduk sebanyak 104.291 Jiwa dan penduduk usia 5–9 tahun memiliki jumlah penduduk sebanyak 106.233 jiwa.

**Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Penduduk (%)
Tahun 2015**

Jenjang Pendidikan	APM	APK
SD/MI	94,22	112,36
SMP/MTs	78,05	99,04
SMA/SMK/MA	52,76	67,26
Perguruan Tinggi	11,03	11,50

Sumber: BPS, Kabupaten Langkat, 2018

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan SD/MI untuk angka partisipasi murni sebesar 94,22% dan angka partisipasi kasar sebesar 112,36%. Untuk tingkat pendidikan tinggi untuk angka partisipasi murni sebesar 11,03% dan angka partisipasi kasar sebesar 11,50%. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Kabupaten Langkat cukup baik

karena dominasi jenjang pendidikan paling banyak yakni tingkat SD/MI. Hal ini dapat memberikan peluang agar penduduk bisa melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Karena tingkat pendidikan tinggi untuk angka partisipasi murni masih rendah sebesar 11,03% dan angka partisipasi kasar sebesar 11,50% dari jumlah penduduk Kabupaten Langkat.

Tabel 4.6 Luas Kecamatan menurut Penggunaanya (Ha)

Kecamatan	Lahan Pertanian			Jumlah
	Sawah	Bukan Sawah	Non Pertanian	
Bahorok	720	105.185	4.278	110.183
Sirapit	1.502	7.917	431	9.850
Salapian	171	20.587	1.415	22.173
Kutambaru	-	22.870	814	23.684
Sei Bingai	3.089	28.793	1.435	33.317
Kuala	876	18.667	1.080	20.623
Selesai	1.215	12.443	3.115	16.773
Binjai	1.311	2.162	732	4.205
Stabat	1.342	6.758	2.785	10.885
Wampu	941	15.185	3.295	19.421
Batang Serangan	118	88.522	1.298	89.938
Sawit Seberang	-	19.637	1.273	20.910
Padang Tualang	238	19.163	2.713	22.114
Hinai	1.551	7.745	1.230	10.526
Secanggih	5.839	13.109	4 171	23.119
Tanjung Pura	2.738	13.507	1.716	17.961
Gebang	2.785	13.438	1.626	17.849
Babalan	4.259	2.337	1.045	7.641
Sei Lapan	1.916	23.104	3.048	28.068
Brandan Barat	1.362	5.678	1.940	8.980
Besitang	1.406	60.708	9.960	72.074
Pangkalan Susu	2.809	10.448	1.878	15.135
Pematang Raya	803	18.672	1.425	20.900
Langkat	36.991	536.635	52.703	626.329

Sumber: BPS, Kabupaten Langkat, 2018

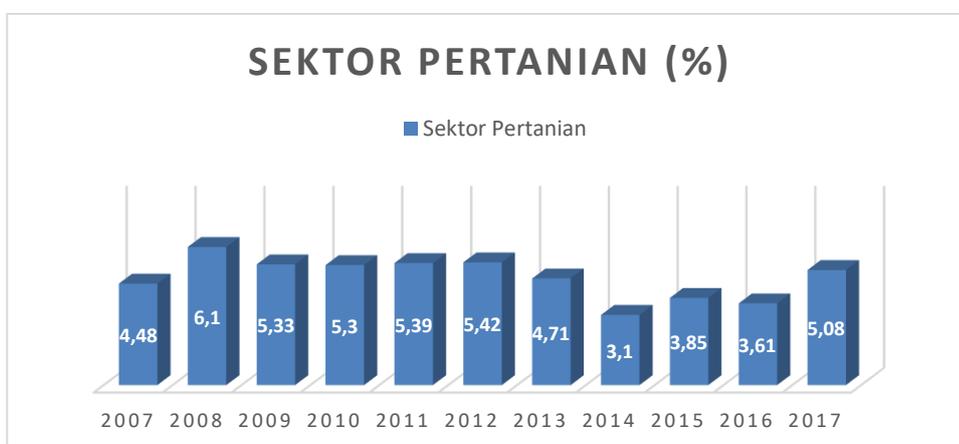
3. Sektor Pertanian

Kegiatan pertanian yang meliputi budaya bercocok tanam dan memelihara ternak merupakan kebudayaan manusia paling tua. Tetapi dibandingkan dengan sejarah keberadaan manusia, kegiatan bertani ini termasuk masih baru. Sebelumnya, manusia hanya berburu hewan dan mengumpulkan bahan pangan untuk dikonsumsi. Berbagai teknologi pertanian dikembangkan guna mencapai produktivitas yang diinginkan.

Tabel 4.7 Sektor Pertanian Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017

Tahun	Pertanian (Miliar)	PDRB (Miliar)
2007	7.165,37,00	15.754,16,00
2008	7.602,28,00	16.553,44,00
2009	8.007,47,00	17.388,20,00
2010	8.432,19,00	18.386,04,00
2011	8.886,96,00	19.594,73,00
2013	9.810,50,00	22.029,48,00
2014	10.115,05,00	23.157,12,00
2015	10.504,66,00	24.321,61,00
2016	10.884,48,00	25.553,81,00
2017	11.437,57,00	26.823,48,00

Sumber: BPS, Kabupaten Langkat



Gambar 4.1 Grafik Sektor Pertanian Kabupaten Langkat (%) Tahun 2007-2017

Dari uraian dan grafik diatas dapat diketahui bahwa persentase pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Langkat pada tahun 2007 sebesar 4.48%. dengan PDRB sebesar Rp.15.754,16,00 miliar. Pada tahun 2010 persentase pertumbuhan sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 5,30% dengan PDRB sebesar Rp.18.386,04,00 miliar. Kemudian pada tahun 2011 persentase pertumbuhan sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 5,39%. Dengan PDRB sebesar Rp.19.594,73,00 miliar. Pada tahun 2014 persentase sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 3.1% dengan PDRB sebesar Rp.23.157,12,00 miliar. Kemudian pada tahun 2016 persentase sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 3,61% dengan PDRB sebesar Rp.25.553,81,00 miliar. Dan pada tahun 2017 persentase sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 5,08% dengan PDRB sebesar Rp.26.823,48,00 miliar. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2008 persentase sektor pertanian mengalami kenaikan signifikan sebesar 6,1% dengan PDRB sebesar Rp.16.553,44,00 miliar. Kemudian pada tahun 2014 terjadi penurunan pertumbuhan sektor pertanian sebesar 3,1% dengan PDRB sebesar jumlah penduduk mengalami penurunan sebesar Rp.23.157,12,00 miliar.

4. Konsep PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Produk Domestik Regional Bruto atau di singkat PDRB merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah regional dalam waktu suatu tahun tertentu. Ada 2 jenis untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto yaitu perhitungan dengan menggunakan harga berlaku dan perhitungan dengan harga konstan.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada beberapa konsep pendekatan yang dapat digunakan yaitu:

a. Konsep Pendekatan Produksi

PDRB adalah banyaknya jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Dalam menghitung PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan harga berlaku dan harga konstan.

b. Konsep Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (Biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan semuanya sebelum dipotong pajak tidak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Pendekatan Pengeluaran

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dikurangi pajak tak langsung netto.

5. PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB menurut lapangan usaha menyajikan 17 kategori lapangan usaha yang berada di Kabupaten Langkat pada tahun tertentu. PDRB harga konstan adalah nilai dari suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar untuk harga tersebut. berikut ini terdapat tabel 4.8 PDRB lapangan usaha tahun 2010- 2017 di Kabupaten Langkat.

**Tabel 4.8 PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2010-2017**

Kategori Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8 432,19,00	8 886,96,00	9 368,94,00	9 810,50,00	10 115,05,00	10 504,66,00	10 884,48,00	11 437,57,00
Pertambangan dan Penggalian	1 658,10,00	1 863,50,00	2 002,36,00	2 116,37,00	2 241,51,00	2 351,96,00	2 473,25,00	2 627,55,00
Industri Pengolahan	2 761,82,00	2 924,23,00	3 098,58,00	3 255,65,00	3 409,08,00	3 576,43,00	3 758,39,00	38 896,57,00
Pengadaan Listrik dan Gas	48,90,00	56,81,00	51,52,00	51,83,00	52,26,00	54,55,00	57,28,00	63,41,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,59,00	7,95,00	8,38,00	8,65,00	8,66,00	8,91,00	9,61,00	10,12,00
Konstruksi	1 157,76,00	1 217,65,00	1 327,74,00	1 454,51,00	1 638,61,00	1 747,71,00	1 867,30,00	1 967,30,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 735,80,00	1 850,95,00	1 960,33,00	2 065,33,00	2 210,10,00	2 376,19,00	2 567,13,00	2 690,41,00
Transportasi dan Pergudangan	351,38,00	371,76,00	396,21,00	426,59,00	457,36,00	488,57,00	522,02,00	562,80,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	328,17,00	354,93,00	390,10,00	419,79,00	446,87,00	473,95,00	510,44,00	550,88,00
Informasi dan Komunikasi	186,76,00	204,89,00	225,23,00	245,94,00	266,19,00	289,19,00	316,76,00	347,95,00
Jasa Keuangan dan Asuransi	278,61,00	314,84,00	363,85,00	397,01,00	427,89,00	454,72,00	483,65,00	502,91,00
Real Estat	460,61,00	492,49,00	539,95,00	583,86,00	628,18,00	657,50,00	686,83,00	727,13,00
Jasa Perusahaan	844,32,00	911,26,00	994,30,00	108,05,00	115,36,00	122,66,00	129,97,00	137,39,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	561,39,00	608,57,00	659,55,00	689,47,00	719,94,00	770,42,00	798,07,00	811,35,00
Jasa Pendidikan	216,58,00	226,08,00	236,56,00	255,56,00	270,83,00	286,09,00	301,35,00	318,03,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	863,61,00	907,11,00	965,55,00	103,93,00	109,12,00	114,32,00	119,85,00	127,85,00
Jasa lainnya	29,52,00	31,27,00	33,33,00	36,42,00	40,07,00	43,73,00	47,39,00	51,13,00
PDRB	18 386,00,00	19 594,73,00	20 858,68,00	22 029,48,00	23 157,12,00	24 321,61,00	25 533,81,00	26 823,48,00

Sumber: BPS, Kabupaten Langkat

Berdasarkan pada table 4.8 diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan PDRB Kabupaten Langkat mengalami kenaikan setiap periode tertentu. Ada

beberapa sektor lapangan usaha yang unggul seperti sektor pertanian kehutanan, dan perikanan pada tahun 2010 sebesar Rp.8.432,19,00 miliar. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar Rp. 9.810,50,00 miliar. Pada tahun 2017 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp.11.437,57,00 miliar. Kemudian untuk lapangan usaha pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2010 sebesar Rp 1.735,80,00 miliar. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar Rp.2.690,41,00 miliar. Selain itu ada sektor lapangan usaha lainnya yang unggul seperti pada sektor konstruksi pada tahun 2010 sebesar Rp.1.157,76,00 miliar. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.638,61 miliar. Pada tahun 2017 sektor konstruksi mengalami kenaikan sebesar Rp.1.967,30,00 miliar. Selain itu ada sektor lain yang memberi nilai sumbangan pada PDRB yaitu sektor transportasi dan pergudangan pada tahun 2010 sebesar Rp.351,38,00 miliar. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar Rp.426,59,00 miliar. Pada tahun 2017 sektor transportasi dan pergudangan mengalami kenaikan sebesar Rp.562,80,00 miliar.

6. PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran menyajikan 7 kategori jenis pengeluaran berdasarkan harga konstan yang berada di Kabupaten Langkat. Jenis pengeluaran konsumsi rumah tangga, Pengeluaran Konsumsi LNPRT, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, Ekspor Barang dan Jasa, Dikurangi Impor Barang dan Jasa. PDRB menurut pengeluaran bertujuan untuk mengetahui seberapa besar

output jenis pengeluaran yang berada di suatu daerah. perhitungan menurut pengeluaran jenis ini menggunakan harga konstan. Berikut ini disajikan pada tabel dibawah ini PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2017 Kabupaten Langkat.

Tabel 4.9 PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2017

Jenis Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	11 959,67,00	12 370,39,00	12 863,47,00	13 362,84,00	13 817,45,00	14 195,60,00	14 702,40,00	15 372,60,00
Pengeluaran Konsumsi LNPR	190,18,00	243,78,00	246,25,00	262,55,00	276,79,00	274,10,00	274,71,00	276,05,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 687,78,00	1 732,81,00	1 801,48,00	1 823,10,00	1 866,52,00	1 916,07,00	1 871,50,00	1 925,07,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3 724,20,00	4 227,60,00	4 436,21,00	4 697,92,00	4 990,36,00	5 061,12,00	5 250,80,00	5 559,51,00
Perubahan Inventori Ulang	789,24,00	331,58,00	482,22,00	422,87,00	670,50,00	703,75,00	599,77,00	502,75,00
Ekspor Barang dan Jasa	8 631,32,00	10 616,21,00	12 308,17,00	12 340,01,00	13 262,61,00	13 439,24,00	13 879,96,00	13 750,61,00
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	8 596,42,00	9 927,67,00	11 279,16,00	10 879,83,00	11 727,14,00	11 268,30,00	11 045,36,00	10 563,14,00
PDRB	18 386,00,00	19 594,73,00	20 858,67,00	22 029,47,00	23 157,11,00	24 321,60,00	25 533,80,00	26 823,47,00

Sumber: BPS Kabupaten Langkat

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat dijelaskan bahwa PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Langkat untuk jenis pengeluaran tahun 2017 paling banyak memberikan sumbangan pada jenis pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar Rp.15.372.606.54,00 miliar. kemudian Dikurangi Impor Barang dan Jasa sebesar Rp.10.563.148.03,00 miliar. Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar Rp.5.559.510.89,00 miliar. dengan Produk Domestik Regional Bruto sebesar Rp.26.823.479.32,00 miliar. Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran yang paling banyak dibandingkan jenis pengeluaran lainnya.

7. Pariwisata

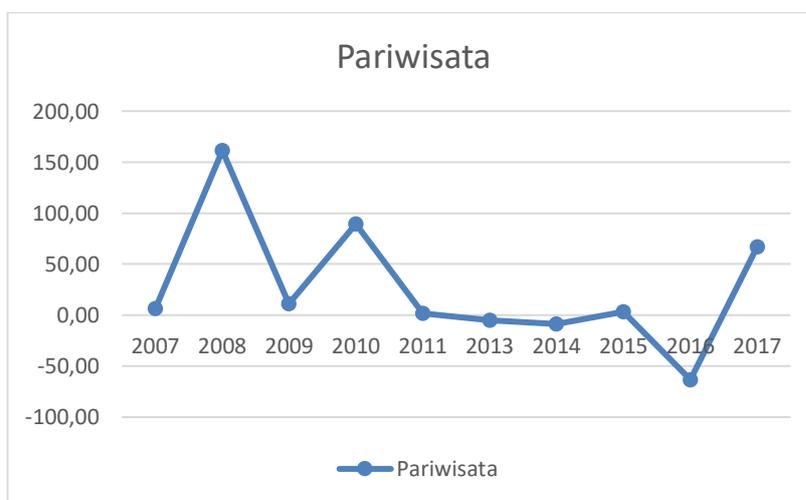
Qadarrochman (2010), pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui

sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olah raga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain, bukanlah merupakan kegiatan yang baru saja dilakukan oleh manusia masa kini. Peranan pariwisata dilihat dari tiga segi, yaitu segi ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kepada wisatawan-wisatawan asing).

**Tabel 4.10 Pariwisata Kabupaten Langkat
Tahun 2007-2017**

Tahun	Mancanegara (Orang)	Domestik (Orang)	Jumlah (Orang)
2007	2.660	7.674	10.334
2008	3.290	23.707	26.997
2009	8.969	20.971	29.940
2010	8.834	47.810	56.644
2011	8.578	49.200	57.778
2013	7.091	46.709	53.800
2014	8.567	40.433	49.000
2015	3.495	47.139	50.634
2016	4.885	13.715	18.600
2017	8.396	22.604	31.000

Sumber: BPS, Kabupaten Langkat



**Gambar 4.2 Pariwisata Kabupaten Langkat (%)
Tahun 2007-2017**

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Langkat tahun 2007 dengan jumlah pengunjung sebanyak 10.334 orang dengan persentase sebesar 6,57%. Kemudian pada tahun 2009 jumlah pengunjung wisata mengalami kenaikan signifikan sebanyak 26.997 orang dengan persentase sebesar 161,24%. Kemudian pada tahun 2010 jumlah pengunjung wisata mengalami penurunan sebanyak 29.940 orang dengan persentase sebesar 10,90%. Pada tahun 2011 perkembangan wisatawan mengalami kenaikan signifikan sebesar 89,19% dengan jumlah pengunjung wisata sebanyak 57.778 orang. Sepanjang tahun 2012 sampai 2015 pertumbuhan sektor pariwisata cenderung menurun tetapi jumlah pengunjung wisata masih tergolong banyak yakni 50.634 orang pada tahun 2015. Pada tahun 2016 persentase sektor pariwisata mengalami penurunan yang signifikan sebesar -66, 26% dengan jumlah pengunjung wisata sebesar 18.600 orang. Yang kemudian mengalami kenaikan tahun 2017 sebesar 66,66% dengan pengunjung wisata sebanyak 31.000 orang. Dapat disimpulkan bahwa jumlah pengunjung wisata di Kabupaten Langkat cenderung tidak stabil. Hal ini dilihat dari jumlah pengunjung wisata yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2016.

8. Tingkat Hunian Hotel

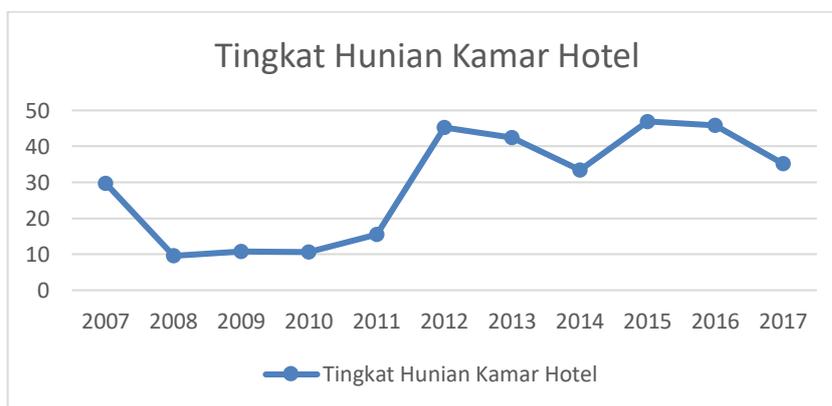
Qadarrochman (2015), bahwa peranan pariwisata dalam pembangunan negara pada garis besarnya dilihat dari tiga segi, yaitu segi ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kepada wisatawan-wisatawan asing). Para pakar ekonomi memperkirakan sektor pariwisata akan menjadi salah satu

kegiatan ekonomi yang penting pada abad ke-21. Dalam perekonomian suatu negara, bila dikembangkan secara berencana dan terpadu, peran sektor pariwisata akan melebihi sektor migas (minyak bumi dan gas alam) serta industri lainnya.

**Tabel 4.11 Tingkat Hunian Kamar Hotel (%)
Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017**

Tahun	Tingkat Penghunian Kamar Hotel (%)
2007	29.76
2008	9.57
2009	10.72
2010	10.61
2011	15.48
2013	42.47
2014	33.44
2015	46.93
2016	45.86
2017	35.19

Sumber: BPS. Provinsi Sumatera Utara.



**Gambar 4.3 Tingkat Hunian Kamar Hotel (%)
Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017**

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa rata-rata inap tamu hotel di Kabupaten Langkat pada tahun 2007 dengan persentase sebesar 29.76% Kemudian pada tahun 2008 rata-rata inap tamu hotel mengalami penurunan sebesar 9,57% kemudian pada tahun 2012 rata-rata inap tamu hotel mengalami

kenaikan signifikan sebesar 45,24%. Pada tahun 2013 rata-rata inap tamu hotel mengalami penurunan sebesar 42,47%. Tahun 2017 rata-rata inap tamu hotel mengalami penurunan dengan persentase sebesar 35,17% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 45,86%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan rata-rata inap tamu hotel mengalami gerakan fluktuatif. Seperti pada tahun 2012 mengalami kenaikan signifikan dan mengalami penurunan sebesar 35,19% pada tahun 2017.

9. Pajak Daerah

Mubasiroh (2018), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah pajak daerah menjadi peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Karena penerimaan daerah dari sektor pajak akan digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini pajak daerah merupakan sumber yang dipungut oleh masyarakat atas penggunaan barang atau lahan di suatu daerah pada tahun tertentu.

**Tabel 4.12 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017**

Tahun	Pajak Daerah (Miliar)
2007	12.636.888.524,00
2008	9.853.627.105,00
2009	17.988.084.889,00
2010	16.249.676.000,00
2011	17.818.656.067,00
2013	27.682.021.547,00
2014	37.150.151.469,00
2015	42.304.284.902,00
2016	46.948.822.153,00
2017	57.043.425.625,00

Sumber: BPS, Kabupaten Langkat



**Gambar 4.4 Grafik Pajak Daerah (Miliar) Kabupaten Langkat
Tahun 2007-2017**

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Langkat setiap tahun mengalami kenaikan dengan pajak daerah tahun 2017 sebesar Rp.57.043.425.625,00 miliar. Sementara itu pajak daerah tahun 2016 sebesar Rp.46.948.822.153,00 miliar. Hal ini disimpulkan bahwa pajak daerah Kabupaten Langkat mengalami kenaikan tahun 2017 dibandingkan tahun 2016.

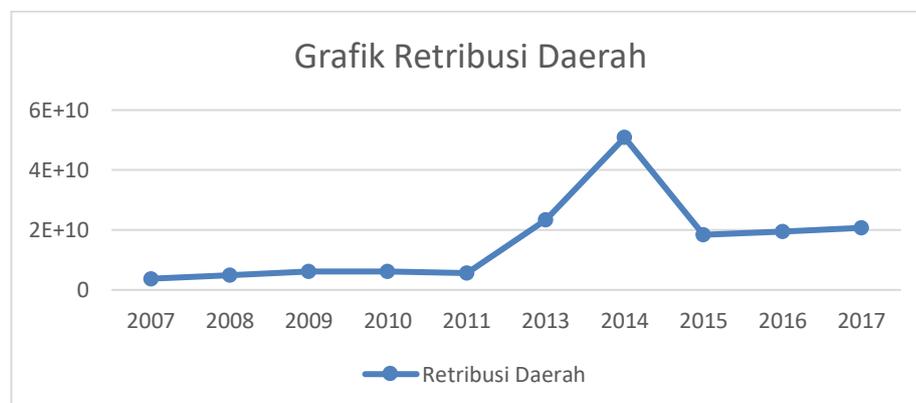
10. Retribusi Daerah

Siagian (2018), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sehingga retribusi berperan sebagai penerimaan daerah dalam satu tahun tertentu. peran retribusi memiliki target yang dikutip kepada masyarakat setiap tahun sehingga pungutan dari retribusi tersebut dapat direalisasikan dalam satu tahun tertentu.

Tabel 4.13 Retribusi Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017

Tahun	Retribusi Daerah (Miliar)
2007	3.750.162.888,00
2008	4.892.798.469,00
2009	6.241.548.608,00
2010	6.087.670.211,00
2011	5.558.807.798,00
2013	23.293.910.248,00
2014	50.817.560.042,00
2015	18.370.307.878,00
2016	19.471.687.021,00
2017	20.765.880.952,00

Sumber: BPS, Kabupaten Langkat



Gambar 4.5 Grafik Retribusi Daerah (Miliar) Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa retribusi daerah sepanjang tahun mengalami gerakan berfluktuatif. Retribusi daerah tahun 2014 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp.50.817.560.042,00 miliar kemudian mengalami penurunan sebesar Rp.18.370.307.878,00 miliar. Untuk tahun 2015 hingga tahun 2017 retribusi daerah mengalami kenaikan hingga Rp.20.765.880.952,00 miliar tahun 2017. Dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah mengalami kenaikan tahun 2017 sebesar Rp.20.765.880.952,00 miliar.

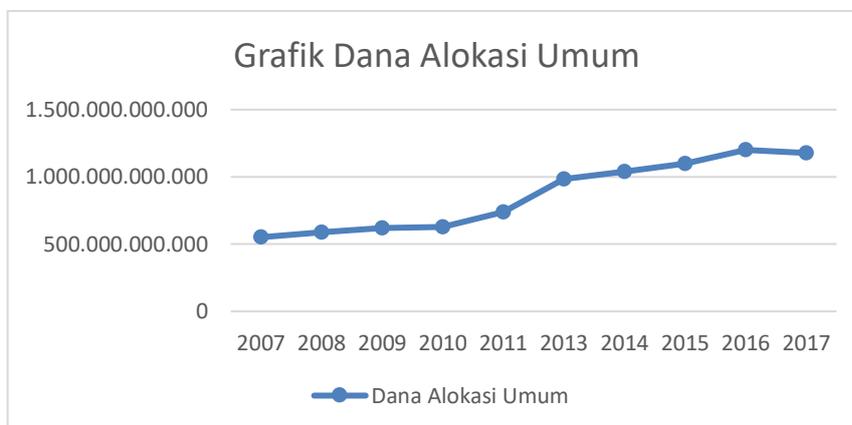
11. Dana Alokasi Umum

Mubasiroh (2018), dana alokasi umum dimaksudkan untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sehingga dalam pembagian Dana Alokasi Umum perlu memperhatikan potensi daerah, kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah di daerah dan ketersediaan APBN. Prinsip alokasi Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika potensi daerah kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

Tabel 4.14 Dana Alokasi Umum Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017

Tahun	Dana Alokasi Umum (Miliar)
2007	551.230.978.000,00
2008	589.366.556.000,00
2009	619.729.900.000,00
2010	628.952.504.000,00
2011	736.887.815.640,00
2013	982.658.132.000,00
2014	1.039.650.946.000,00
2015	1.099.486.754.000,00
2016	1.200.481.463.000,00
2017	1.179.392.864.000,00

Sumber: BPS. Kabupaten Langkat



Gambar 4.6 Grafik Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Miliar) Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa dana alokasi umum Kabupaten Langkat mengalami penurunan. Tahun 2017 dana alokasi umum mengaami penurunan sebesar Rp.1.179.392.864.000,00 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp.1.200.481.463.000,00. Hal ini memberikan dampak bahwa dana alokasi umum menjadi peran penting bagi penerimaan daerah Kabupaten Langkat.

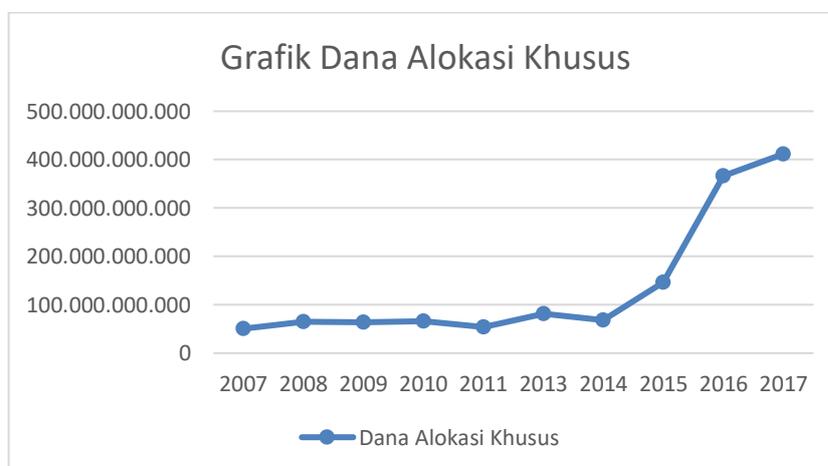
12. Dana Alokasi Khusus

Siagian (2018), dana alokasi khusus memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

Tabel 4.15 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017

Tahun	Dana Alokasi Khusus (Miliar)
2007	50.441.000.000,00
2008	64.975.000.000,00
2009	63.972.000.000,00
2010	65.865.700.000,00
2011	53.872.700.000,00
2013	81.165.730.000,00
2014	71.625.500.000,00
2015	146.253.880.000,00
2016	366.784.373.410,00
2017	411.765.101.584,00

Sumber: BPS. Kabupaten Langkat



Gambar 4.7 Grafik Dana Alokasi Khusus (Miliar) Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa dana alokasi khusus Kabupaten Langkat mengalami gerakan berflutuatif dimana tahun 2009 dana

alokasi khusus menurun sebesar Rp.63.972.000.000,00 miliar dibandingkan tahun 2008. Kemudian tahun 2011 menurun sebesar Rp.53.872.700.000,00 miliar dibandingkan dengan tahun 2010. Dana alokasi khusus meningkat signifikan tahun 2016 sebesar Rp.366.784.373.410,00 miliar dibandingkan tahun 2015. Kemudian tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp.411.765.101.584,00 miliar.

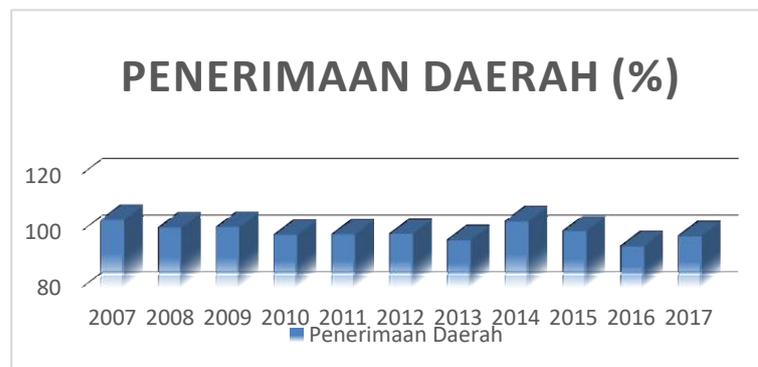
13. Penerimaan Daerah

Dalam mencari penerimaan daerah untuk pendapatan asli daerah salah satunya dapat dilihat dari kondisi daya pajak daerah. Daya pajak merupakan pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak dan dibandingkan dengan potensi pajaknya (*tax potential*) yaitu sejumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari pajak (*tax base*) dikalikan tarifnya

**Tabel 4.16 Penerimaan Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2007-2017**

Tahun	Target (Miliar)	Realisasi (Miliar)	Persentase (%)
2007	787.803,36,00	818.789,13,00	104,03
2008	819.448,,75,00	830.885,01,00	101,40
2009	876.735,68,00	890.337,15,00	101,55
2010	1.004.947,18,00	994.609,31,00	98,84
2011	1.121.589,52,00	1.108.552,89,00	98,99
2013	1.603.656,98,00	1.555.901,88,00	97,02
2014	1.623.707,89,00	1.682.148,38,00	103,06
2015	2.017.699,11,00	2.020.688,70,00	100,15
2016	2.336.327,10,00	2.215.047,13,00	94,81
2017	2.348.070,65,00	2.311.283,15,00	98,43

Sumber: BPS, Kabupaten Langkat



Gambar 4.8 Penerimaan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007-2017

Dari gambar 4.8 diatas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan daerah di Kabupaten Langkat pada tahun 2007 sebesar 104,03%. Pada tahun 2008 realisasi penerimaan daerah mengalami penurunan sebesar 101,40%. Tahun 2013 realisasi penerimaan daerah mengalami penurunan sebesar 97,02%. Kemudian tahun 2014 realisasi penerimaan daerah mengalami kenaikan sebesar 103,06%. Tahun 2017 realisasi penerimaan daerah kabupaten langkat mengalami kenaikan sebesar 98,43%. Dibandingkan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 94,81%. Dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan daerah cenderung tidak berflutuatif. Menurut BPS Indonesia dalam

Dwita (2017), bahwa, walaupun realisasi dalam pencapaian anggaran pendapatan daerah telah tercapai namun belum mencerminkan keadaan perekonomian yang produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jika di analisa bahwa kurang stabilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sesuai dengan semangat perkembangan ekonomi saat ini yang seharusnya meningkat ke progres yang lebih baik dari pada tahun sebelumnya. Walaupun peningkatannya tidak secara signifikan namun seharusnya bisa meningkat secara terstruktur dari tahun ke tahun untuk menjaga kestabilan perekonomian daerah.

Menurut Saputro (2015), bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu potensi yang sangat mendukung pasokan devisa negara secara nyata, langsung maupun tidak langsung yang dapat dinikmati oleh para pelaku sektor tersebut secara riil. Bisnis pariwisata menjadi salah satu sektor penyumbang perolehan devisa yang cukup besar bagi negara khususnya wisatawan mancanegara.

14. Hasil Analisis *Confirmatory Factor Analysis* (CFA)

Analisis faktor (*Factor Analysis*) merupakan suatu teknik statistik *multivariate* yang digunakan untuk mengurangi (*reduction*) dan meringkas (*summarization*) semua variabel terikat dan saling berketergantungan. Hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel yang lain yang akan diuji untuk diidentifikasi dimensi atau faktornya. (Ujianto, dan Abdulrachman, 2004).

Tabel 4.17 : KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.479
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	91.106
	df	21
	Sig.	.000

Metode yang digunakan dalam analisis faktor ini yaitu metode komponen utama. Dari output diatas, didapat nilai *kaiser mayer oikin* (KMO) sebesar 0,479. Nilai ini menandakan data sudah valid untuk dianalisis lebih lanjut dengan analisis faktor. Nilai uji *bartlett* sebesar 91.106 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 sangat jauh dibawah 5%. Maka matriks korelasi yang terbentuk merupakan matriks identitas atau dengan kata lain model faktor yang digunakan sangat baik.

Tabel 4.18 : Communalities

	Initial	Extraction
Pertanian	1.000	.960
Pariwisata	1.000	.846
Tingkat Hunian Hotel	1.000	.702
Pajak Daerah	1.000	.963
Retribusi Daerah	1.000	.683
Dana Alokasi Umum	1.000	.989
Dana Alokasi Khusus	1.000	.886

Extraction Method: Principal Component Analysis.

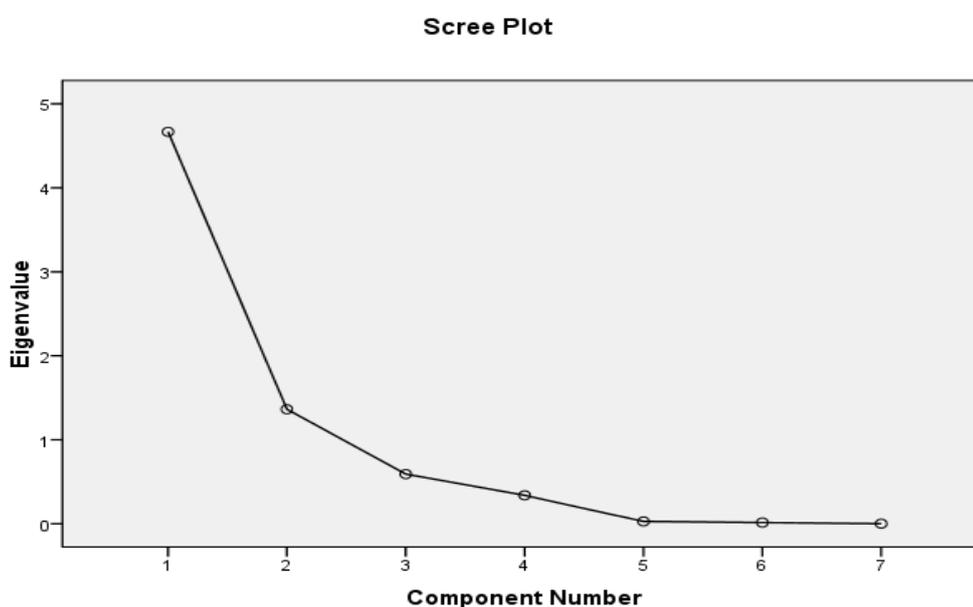
Hasil analisis diatas berarti menunjukkan bahwa semakin besar *communalities* sebuah variabel, berarti semakin erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Hasil *extraction* menunjukkan secara individu seluruh variabel dinyatakan memiliki kontribusi yang melebihi 50% atau 0,5. Namun kelayakan selanjutnya harus di uji dengan *variance explained*.

Tabel 4.19 : Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4.667	66.674	66.674	4.667	66.674	66.674	4.656	66.518	66.518
2	1.363	19.469	86.144	1.363	19.469	86.144	1.374	19.626	86.144
3	.591	8.441	94.585						
4	.338	4.832	99.417						
5	.027	.383	99.800						
6	.014	.195	99.995						
7	.000	.005	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Berdasarkan hasil total *variance explained*, diketahui bahwa hanya ada 2 komponen variabel yang menjadi faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah. *Eigenvalues* menunjukkan kepentingan relatif masing-masing factor dalam menghitung variance ke 7 variabel yang dianalisis. Dari tabel diatas terlihat bahwa hanya ada 2 faktor yang terbentuk. Karena kedua faktor memilik nilai total angka *eigenvalues* masih diatas 1 yakni = 4.667 untuk faktor 1, dan faktor 2 = 1.363. Sehingga proses *factoring* seharusnya berhenti pada 2 saja atau kedua variabel yang akan ikut dalam analisis selanjutnya.



Gambar 4.9
Scree Plot Uji Comonent Number

Jika tabel total *variance* menjelaskan dasar jumlah faktor yang didapat dengan perhitungan angka, maka secree plot menampakkan hal tersebut dengan grafik, terlihat bahwa dari satu ke dua faktor (garis dari sumbu *Component Number* =1 ke 2), arah grafik menurun dengan cukup tajam.

Kemudian dari angka 3 ke 4. Angka 1 dari sumbu Y (*Eigenvalues*). Hal ini menunjukkan bahwa dua faktor adalah paling bagus untuk meringkas ketujuh variabel tersebut.

Tabel 4.20 : Component Matrix^a

	Component	
	1	2
Pertanian	.974	.111
Pariwisata	.051	.918
Tingkat Hunian Hotel	.837	-.039
Pajak Daerah	.977	-.094
Retribusi Daerah	.682	.467
Dana Alokasi Umum	.993	.061
Dana Alokasi Khusus	.782	-.524

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Dari hasil diatas dapat dijelaskan bahwa setelah diketahui bahwa dua faktor adalah jumlah yang paling optimal maka dapat dilihat dalam tabel *Component Matrix* menunjukkan distribusi dari ketujuh variabel tersebut pada dua faktor yang terbentuk. Sedangkan angka-angka yang ada pada tabel tersebut adalah *factor loadings*, yang menunjukkan besar korelasi antar suatu variabel dengan faktor 1 dan faktor 2. Proses penentuan variabel dilakukan dengan melakukan perbandingan besar korelasi pada setiap baris.

Tabel 4.21 : Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
Pertanian	.966	.167
Pariwisata	-.002	.920
Tingkat Hunian Hotel	.838	.010
Pajak Daerah	.981	-.037
Retribusi Daerah	.654	.506
Dana Alokasi Umum	.987	.118
Dana Alokasi Khusus	.811	-.478

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser

Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Component matrix hasil proses rotasi (*rotated component matrix*) memperlihatkan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata. Terlihat bahwa *factor loadings* yang dulunya kecil semakin diperkecil dan *factor loadings* yang besar semakin diperbesar hasil dari komponen hasil dari pariwisata dan dana alokasi umum.

Tabel 4.22 : Component Transformation Matrix

Component	1	2
1	.998	.058
2	-.058	.998

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Dari tabel komponen *transformation matrix*, terlihat angka-angka yang ada pada diagonal antara component 1 dengan 1 dan component 2 dengan 2 terlihat kedua angka jauh diatas 0,5. Hal ini membuktikan keempat

faktor (*componennt*) yang terbentuk sudah tepat, karena mempunyai korelasi yang tinggi.

Component Matrix hasil proses rotasi (*Rotated Component Matrix*) memperlihatkan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata. Terlihat bahwa faktor *loading* yang dulunya kecil semakin kecil dan faktor *loading* yang besar semakin di perbesar. Berdasarkan hasil nilai *component matrix* diketahui bahwa dari sepuluh faktor, maka yang layak untuk mempengaruhi kemiskinan adalah empat faktor yang berasal dari:

Komponen 1 terbesar : Dana Alokasi Umum

Komponen 2 terbesar : Pariwisata

Sehingga model persamaan OLS yaitu regresi linear berganda dalam penelitian ini di rumuskan:

$$Y = a + b_1 X_1 - b_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Penerimaan Daerah

X₁ = Dana Alokasi Umum

X₂ = Pariwisata

e =Error term

Dengan kerangka konseptual sebagai berikut:

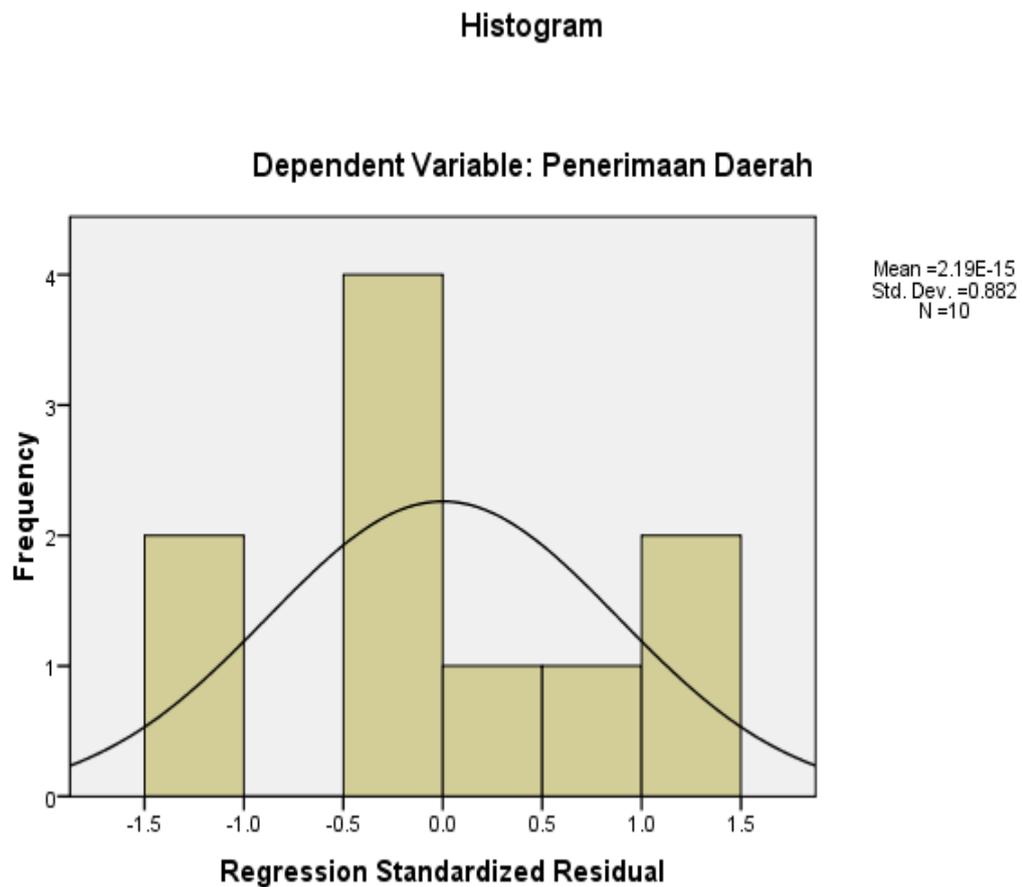
15. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui apakah ada data yang memiliki distribusi normal atau tidak,

penulis menggunakan analisis grafik terdiri dari histogram dan *normal probability plot*. Berikut ditampilkan uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram dan *normal probability plot*.

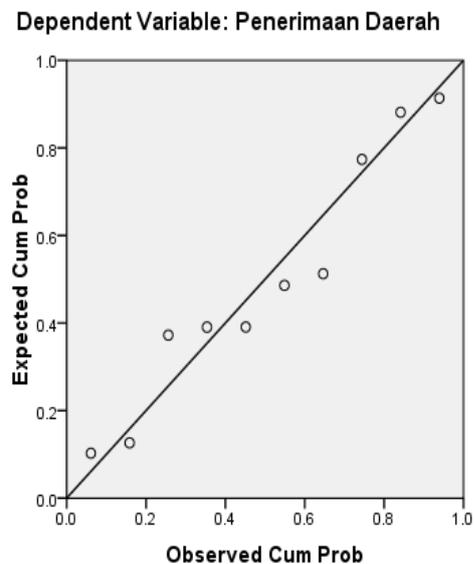
Gambar 4.10
Hasil Uji Normalitas dengan *Histogram*



Garis histogram diatas menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik *histogram* yang menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal yang menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hal ini juga didukung dengan hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik *Plot*.

Gambar 4.11
Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Bedasarkan grafik Normal P-Plot diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar digaris diagonal (tidak terpenjar jauh dari garis diagonal) maka Grafik Normal P-Plot ini dinyatakan normal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.23 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	90.71029588
Most Extreme Differences	Absolute	.186
	Positive	.186
	Negative	-.156
Kolmogorov-Smirnov Z		.588
Asymp. Sig. (2-tailed)		.880
a. Test distribution is Normal.		

Hasil *Kolmogorov-Smirnov* Test menunjukkan data juga normal karena nilai Asymp sig $0,880 > 0,05$ sehingga data dikatakan normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah antara variabel bebas memiliki hubungan yang sempurna atau tidak. Pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF) bedasarkan hasil output SPSS, apabila nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance mendekati 1 dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolinieritas.

Tabel 4.24
Hasil Uji Multikolinieritas

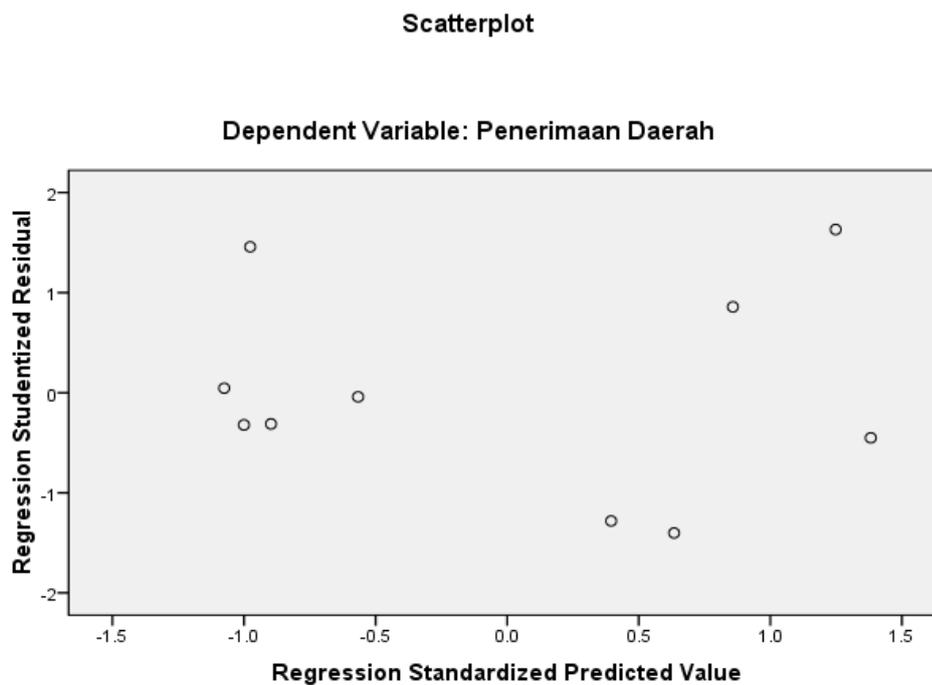
Model	Unstandardized Coefficients		t	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error		Tolerance	VIF
1 (Constant)	-394.245	133.789	-2.947		
Dana Alokasi Umum	.2.241	.132	17.000	.986	1.014
Pariwisata	-.002	.002	-1.231	.986	1.014

a. Dependent Variable: Penerimaan Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari multikolinieritas. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa variabel dana alokasi umum memiliki nilai VIF 1.014 (< 10) dan nilai tolerance 0.986 ($> 0,10$). Variabel sektor pariwisata memiliki VIF 1.014 (< 10) dan nilai tolerance 0,986 ($> 0,10$). Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa seluruh variabel terbebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual pada semua pengamatan didalam model regresi. Hasil dari uji heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.12
Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot

Dari grafik *Scatterplot* tersebut dapat bahwa penyebaran residual adalah tidak teratur. Hal tersebut dapat dilihat pada titik-titik atau plot yang menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian, kesimpulan yang biasa diambil adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi ada korelasi kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.25
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.988 ^a	.976	.970	102.85881	1.883

a. Predictors: (Constant), Pariwisata, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Penerimaan Daerah

Berdasarkan tabel diatas pada kolom Durbin-Watson, dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1.883 yang menunjukkan tidak terjadi autokorelasi karena nilainya berada diantara -2 dan $+2$.

16. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda untuk menguji sejauh mana dan arah pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil dari regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.26
Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	-394.245	133.789		-2.947	.022
Dana Alokasi Umum	.2.241	.132	.994	17.000	.000
Pariwisata	-.002	.002	-.072	-1.231	.258

a. Dependent Variable: Penerimaan Daerah

Bedasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan SPSS.16.0 diatas maka di dapat persamaan regresi linier berganda model regresi sebagai berikut:

$$Y = -394.245 + 2.241X_1 - 0,002X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Derah

X₁ = Dana Alokasi Umum

X₂ = Pariwisata

e = Tingkat kesalahan pengganggu

Bedasarkan persamaan regresi tersebut dapat dianalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

- a. Nilai *Constanta* (a) = -394.245. Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila tidak dipengaruhi nilai variabel bebas yaitu dana alokasi umum dan pariwisata maka penerimaan daerah tidak mengalami perubahan atau konstan yaitu sebesar = -394.245.
- b. Nilai koefisien dana alokasi umum = 2.241. Koefisien regresi ini bertanda positif yaitu 2.241 artinya apabila terjadi perubahan variabel

dana alokasi umum maka akan meningkatkan penerimaan daerah sebesar 2.241.

- c. Nilai koefesien pariwisata = -0.002. Koefesien regresi ini bertanda negatif yaitu -0.002. artinya apabila terjadi perubahan variabel pariwisata maka akan menurunkan penerimaan daerah sebesar -0.002.

17. Test Goodness of Fit

a. Uji Hipotesis secara Parsial (Uji_t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent, yaitu dana alokasi umum dan pariwisata secara parsial terhadap variabel dependennya yaitu penerimaan daerah yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Pengambilan keputusan didasarkan pada probabilitas signifikansi 0,05 (5%)

Tabel 4.27
Hasil Uji_t Statistik

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-394.245	133.789		-2.947	.022
Dana Alokasi Umum	.2.241	.132	.994	17.000	.000
Pariwisata	-.002	.002	-.072	-1.231	.258

a. Dependent Variable: Penerimaan Daerah

Uji signifikansi masing-masing variabel diuraikan sebagai berikut:

H₁: Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah.

Bedasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai signifikansi untuk variabel dana alokasi umum sebesar 0,000. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (5%) artinya secara parsial variabel dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan daerah.

H₂: Pariwisata tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah.

Bedasarkan hasil pengujian statistik parsial bahwa variabel pariwisata memiliki nilai signifikansi sebesar 0,258. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikan lebih kecil atau sama dengan 0,05 (5%) maka H₁ diterima dan sebaliknya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,258 > 0,05$ (5%) artinya secara parsial pariwisata tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah.

b. Uji Hipotesis Simultan

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Imam Ghozali, 2006).

Tabel 4.28
Hasil Uji F_Statistik

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1Regression	3063970.880	2	1531985.440	144.809	.000 ^a
Residual	74055.220	7	10579.317		
Total	3138026.100	9			

a. Predictors: (Constant), Pariwisata, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Penerimaan Daerah

Berdasarkan tabel ANOVA hasil uji F_{hitung} di atas sebesar 0.000^a. Jika dibandingkan F_{tabel} pada tingkat kepercayaan 5% ($\alpha = 0,05$) yang besarnya hanya 0.000 $F_{hitung} (0,000) > F_{tabel} (0,05)$ yang berarti variabel bebas (dana alokasi umum dan pariwisata) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (penerimaan daerah).

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin besar koefisien determinasinya maka semakin besar variasi variabel independennya (variabel bebas) mempengaruhi variabel dependen (variabel terikat).

Tabel 4.29
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.988 ^a	.976	.970	102.85881	1.883

a. Predictors: (Constant), Pariwisata, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Penerimaan Daerah

Berdasarkan tabel diatas pada kolom *R Square*, diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,976 yang berarti 97,6% artinya variabel penerimaan daerah dipengaruhi oleh variabel artinya dana alokasi umum dan pariwisata sedangkan sisanya 2,4% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Hasil Analisis *Confirmatory Factor Analysis* (CFA)

Hasil analisa pada CFA menunjukkan bahwa dari tabel KMO and Bartlett's test, didapat nilai *Kaiser Mayer Olkim* (KMO) sebesar 0,479 dimana nilai tersebut lebih dari 0,5. Nilai ini menandakan data sudah valid untuk di analisis lebih lanjut dengan analisis faktor. Nilai uji *Bartlett* sebesar 91.106 dengan nilai signifikan sebesar 0.000 di bawah 5%. Maka matriks korelasi yang terbentuk dibawah 5%. Maka matriks korelasi yang terbentuk merupakan matriks identitas.

Hasil analisis data menunjukkan semakin besar *communalities* sebuah variabel, berarti semakin erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Tabel *communalities* menunjukkan hasil *extraction* secara individu terdapat tujuh variabel yang memiliki kontribusi yang melebihi 0,5 atau 50% yaitu dana alokasi umum, pajak daerah, pertanian, dana alokasi khusus, pariwisata, tingkat hunian hotel dan retribusi daerah memiliki nilai *ectraction* diatas 0,5 atau 50%. Namun kelayakan selanjutnya harus diuji dengan *variance Explained*.

Hasil total *variance explained* diketahui hanya ada 2 komponen variabel yang menjadi faktor mempengaruhi. Dari tabel *variance Explained* terlihat bahwa hanya ada 2 faktor yang terbentuk. Karena kedua faktor memiliki nilai total angka *eigenvalues* diatas 1 yaitu sebesar 4,667 untuk faktor 1, kemudian faktor 2 sebesar 1,363 untuk faktor 2. Sehingga proses *factoring* berhenti pada 2 faktor saja yang akan ikut dalam analisis selanjutnya. Selanjutnya grafik *scree plot* menunjukkan bahwa dari satu ke dua faktor arah grafik menurun,

faktor ketiga sudah di bawah angka 1 dari sumbu Y (*Eigenvalues*). Hal ini menunjukkan bahwa dua faktor adalah paling bagus untuk meringkas delapan variabel tersebut.

Setelah diketahui bahwa dua faktor adalah jumlah yang paling optimal, maka dapat dilihat dalam tabel *component matrix* menunjukkan distribusi dari delapan variabel tersebut pada dua faktor yang terbentuk. Lalu dapat dilihat pada tabel *component matrix* menunjukkan korelasi diatas 0,5 pada faktor 1 adalah dana alokasi umum. Sedangkan pada faktor 2 yaitu variabel pariwisata. Selanjutnya melakukan faktor *rotation* terhadap faktor yang terbentuk. Tujuan rotasi untuk memperjelas variabel yang masuk kedalam faktor tertentu.

2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa dana alokasi umum, pariwisata sebagai variabel independen, penerimaan daerah sebagai variabel dependen menunjukkan hubungan yang signifikan. Nilai R 0,986. Angka koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) adalah 0,976 hal ini berarti 97,6% menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum dan pariwisata mampu dijelaskan oleh variabel tersebut, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Dengan demikian hal ini berarti kemampuan variabel independen dalam memprediksi variabel dependen sangat tinggi.

Pada uji parsial t variabel sektor pertanian di peroleh p-value sebesar 0,000 ($< 0,05$). Hal ini berarti dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah secara parsial. Variabel pariwisata diperoleh 0,254 ($> 0,05$) hal ini berarti bahwa sektor pariwisata tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah secara parsial. Hasil uji F menunjukkan 0,000 ($<$

0,05) yang berarti dana alokasi umum dan pariwisata berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Langkat.

a. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Penerimaan Daerah

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Langkat.

2. Perbedaan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian sebelumnya sesuai dengan hasil penelitian Lubis (2018) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kesimpulan Peneliti

Penelitian ini menyatakan bahwa dana alokasi umum yang jika semakin besar memengaruhi penerimaan daerah. Bahwa peranan dana alokasi umum merupakan aspek penting yang berpengaruh terhadap penerimaan daerah.

b. Pengaruh Pariwisata Terhadap Penerimaan Daerah

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Langkat.

2. Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian sebelumnya sesuai dengan hasil penelitian oleh Arraniry (2018) menunjukkan bahwa jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Kesimpulan Peneliti

Kesimpulan peneliti menjelaskan bahwa peran pariwisata menjadi peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. seperti mampu mendorong masyarakat dalam meningkatkan pendapatan usaha. Tetapi peran jumlah kunjungan wisatawan belum mampu meningkatkan penerimaan daerah disebabkan karena orang yang berkunjung di suatu daerah belum bisa di katakan sebagai wisatawan jika kurang dari 24 jam serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah di Kabupaten Langkat” adalah sebagai berikut:

1. Dana alokasi umum dan pariwisata yang relevan dalam mempengaruhi penerimaan daerah di Kabupaten Langkat.
2. Faktor dana alokasi umum yang relevan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Langkat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dana alokasi umum seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan perekonomian daerah. Apalagi Kabupaten Langkat memiliki wilayah yang luas dan daerah yang tertinggal. Banyak kebijakan pemerintah yang perlu dilakukan dalam kemajuan daerah, khususnya pariwisata, tetapi perlu dilakukan upaya yang tepat dalam meningkatkan pelayanan publik. khususnya pelayanan pendidikan, kesehatan, serta kegiatan lainnya yang dapat membantu masyarakat keluar dari masalah ekonomi. Tetapi peran tersebut perlu memperhatikan keseimbangan anggaran daerah agar tidak mengalami defisit.

2. Pariwisata menjadi hal penting dalam kemajuan daerah. Banyak aspek yang perlu diperhatikan bagi pariwisata. Seperti kegiatan pariwisata, objek wisata, informasi yang lain yang dapat menarik minat wisatawan. Hal ini perlu ditingkatkan lagi bidang wisata agar jumlah kunjungan wisatawan semakin banyak sehingga dapat mendorong perekonomian daerah khususnya bagi pelaku usaha di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyani, Fauziah. (2015). *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Sektor Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan Padi Di Kota Palembang. Jurnal Profit Volume 2, Nomor 2 November 2015.*
- Aliandi, Vidya Dwi Anggitasari. (2013). *Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Kota Yogyakarta). Journal Of Economics Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Halaman 1-14*
- Andika, R. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. JUMANT, 11(1), 189-206.
- Andika, R. (2018). Pengaruh Kemampuan Berwirausaha dan Kepribadian Terhadap Pengembangan Karir Individu Pada Member PT. Ifaria Gemilang (IFA) Depot Sumatera Jaya Medan. JUMANT, 8(2), 103-110.
- Andika, R. (2018). PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN PENGAWASAN TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA PT ARTHA GITA SEJAHTERA MEDAN. JUMANT, 9(1), 95-103.
- Ardian, N. (2019). Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja, Dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB. JEpa, 4(2), 119-132.
- Arraniry, Fernanda. (2018). *Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tahun 2012-2016). Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta.*
- Arlina, Riska. (2013). *Analisis Penerimaan Daerah Dari Industri Pariwisata Di Provinsi DKI Jakarta Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.*
- Atmaja, Arief Eka. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.*
- Badan Pusat Statistik. (BPS). Kabupaten Langkat dalam Angka Tahun 2008-2018. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (BPS). Provinsi Sumatera Utara dalam Angka Tahun 2008-2018. Badan Pusat Statistik.
- Dwita, Beatrik Okta. (2017). *Pengaruh Sektor Pertanian Dan Sektor Pengolahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pringsewu Periode 2009-2016 Dalam Persepektif Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.*

- Fiqih, Abdul. (2010). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tangerang tahun 2004-2008. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.*
- Fusanto, Andri. (2018). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara Dengan Belanja Daerah Sebagai Intervening. Program Studi Strata I Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.*
- Irawan, Toni Kussetiyono. (2013). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Investasi, Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.*
- Harahap, R. (2018). Pengaruh Kualitas produk Terhadap Kepuasan Pelanggan di Restoran Cepat saji Kfc Cabang Asia Mega Mas Medan. JUMANT, 7(1), 77-84.
- Harahap, R. (2018). ANALISA KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI CV. REZEKI MEDAN. JUMANT, 8(2), 97-102.
- Haryanti, Rini. (2018). *Analisis Sektor Pertanian dan Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2017. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.*
- Hutasoit, Normaika. (2017). *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dan Jumlah Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Sub Sektor Pdrb Industri Pariwisata Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2013. JOM Fekon, Vol.4 No.1 (Februari) 2017.*
- Karyadi, Santika Adhi. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2014. Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.*
- Lestari, Suci. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Soppeng Periode 2005-2014. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.*
- Lubis, Tiara Natasha Prameshwari Effendi. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Terhadap Belanja Modal. (Studi Kasus Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2014). Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

- Mesra, B. (2019). IBU RUMAH TANGGA DAN KONTRIBUSINYA DALAM MEMBANTU PEREKONOMIAN KELUARGA DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG. *JUMANT*, 11(1), 139-150.
- Mubasiroh, Lailatul. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016. Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.*
- Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). Country of origin as a moderator of halal label and purchase behaviour. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2).
- Nasution, M. D. T. P., Rossanty, Y., Achmad Daengs, G. S., Sahat, S., Rosmawati, R., Kurniasih, N., ... & Rahim, R. (2018). Decision support rating system with Analytical Hierarchy Process method. *Int. J. Eng. Technol*, 7(2.3), 105-108.
- Priyono, Nuwun. (2011). *Analisis Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kota Magelang Periode Tahun 2001-2010). Fakultas Ekonomi Universitas Tidar.*
- Pujiono, Dodik Slamet. (2016). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Di Provinsi Maluku Utara). Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 10 , No 1 Januari 201 6 Hal. 68 – 8.*
- Purwaningsih, Esti. (2011). *Analisis faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Sragen tahun 1991-2008. Program PascaSarjana Magister Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.*
- Qadarrochman, Nasrul. (2015). *Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kota Semarang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.*
- Rusiadi, Subiantoro N, Hidayat, R. (2014). *Metode Penelitian, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan. Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos dan Lisrel. Cetakan Kedua. Medan: USU Press.*
- Saputro, Eko. (2015). *Analisis Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Sekabupaten/Kota Di Jawa Tengah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.*
- Sembiring, Rahmat. (2018). *Dampak Perubahan Budaya Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Pada Masyarakat Desa Pahlawan. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik. Vol. 3 No. 1. Januari 2018. Universitas Pembangunan Panca Budi, jl. Gatot Subroto Km 4,5 Medan*

- Setiawan, Anjar. (2010). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.*
- Setiawan, N., Nasution, M. D. T. P., Rossanty, Y., Tambunan, A. R. S., Girsang, M., Agus, R. T. A., ... & Nisa, K. (2018). Simple additive weighting as decision support system for determining employees salary. *Int. J. Eng. Technol*, 7(2.14), 309-313.
- Setiawan, N. (2018). PERANAN PERSAINGAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN (Resistensi Terhadap Transformasi Organisasional). *JUMANT*, 6(1), 57-63.
- Shella, Zelvian. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302-0172 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 2, No. 3, Agustus 2014.*
- Siagian, Erlinda. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2016. Prodi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.*
- Siregar, M. Y. (2019). PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN REMUNERASI TERHADAP PRESTASI KERJA MELALUI ETOS KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI. *JUMANT*, 11(1), 151-164.
- Siregar, N. (2018). Pengaruh Pencitraan, Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Kampoenng Deli Medan. *JUMANT*, 8(2), 87-96.
- Siregar, N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Dalam Menggunakan Indihome Sebagai Penyedia Jasa Internet Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Plaza Telkomcabang Iskandar Muda No. 35 Medan Baru). *JUMANT*, 7(1), 65-76.
- Siregar, N. (2018). ANALISIS PRODUK DAN CITRA KOPERASI TERHADAP WIRAUSAHA KOPERASI DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT DESA LUBUK SABAN PANTAI CERMIN KABUPATEN DELI SERDANG. *JUMANT*, 9(1), 79-93.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Andri Mardi. (2015). *Analisis Tingkat Hunian Dan Pendapatan Hotel Di Kabupaten Jember Selama Bulan Berkunjung Ke Jember (BBJ). JEAM Vol XIV April 2015.*

- Windriyaningrum, Lia Ardiani. (2013). *Pengaruh Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Wisatawan, Dan Jumlah Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus Tahun 1981-2011*. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Yoda, Tilawatil Ciseta. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Retribusi Pasar Di Kota Padang*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.